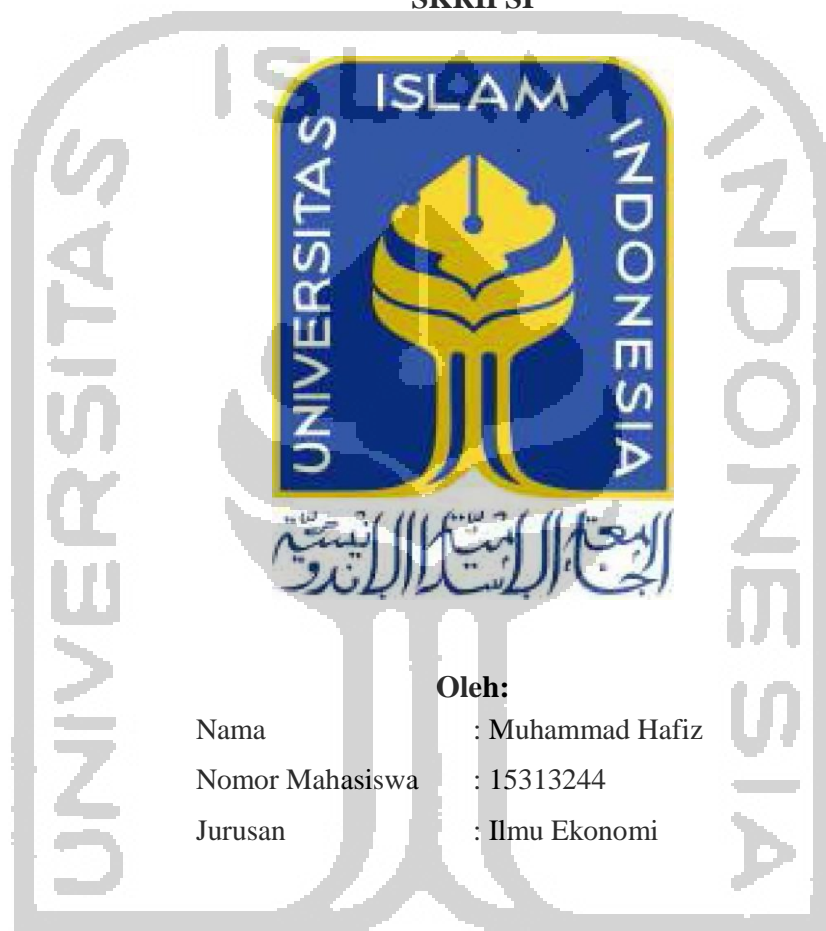


**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI
PULAU JAWA TAHUN 2001-2017**

SKRIPSI



Oleh:
Nama : Muhammad Hafiz
Nomor Mahasiswa : 15313244
Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI

PULAU JAWA TAHUN 2001-2017

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Muhammad Hafiz

Nomor Mahasiswa : 15313244

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2019

Penulis,



Muhammad Hafiz
Muhammad Hafiz

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI
PULAU JAWA TAHUN 2001-2017

Nama : Muhammad Hafiz
Nomor Mahasiswa : 15313244
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 3 September 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,


Prastowo, S.E., M.Ec.Dev

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PULAU JAWA
TAHUN 2001-2017

Disusun Oleh : **MUHAMMAD HAFIZ**

Nomor Mahasiswa : **15313244**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 12 Agustus 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Prastowo, SE., M.Ec..Dev.

Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr., Wb.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam dan Ilmu pengetahuan serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pen jembatan Ilmu sehingga sampai kepada penulis.
- Ayahanda Sulaiman Ismail dan Ibunda Siti Hasanah yang selalu memberikan dukungan, doa, serta ilmunya sehingga dapat digunakan sebaik mungkin. Terimakasih atas kasih sayangnya yang mungkin tak dapat ku balas secara penuh.
- Kakak dan Adik yang terus mengingatkan penulis untuk tetap berada pada semangat yang tinggi. Terimakasih banyak atas perhatian kalian.
- Seluruh elemen Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang memberikan pendidikan akademik maupun non akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.

MOTTO

“Sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup.”

-Abu Dawud & at-Tirmidzi-

“Nil Satis Nisi Optimum”

-Everton F.C-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala karunia rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena syafaatnya telah menyampaikan manusia kepada zaman terang menuju ridho dari Allah SWT.

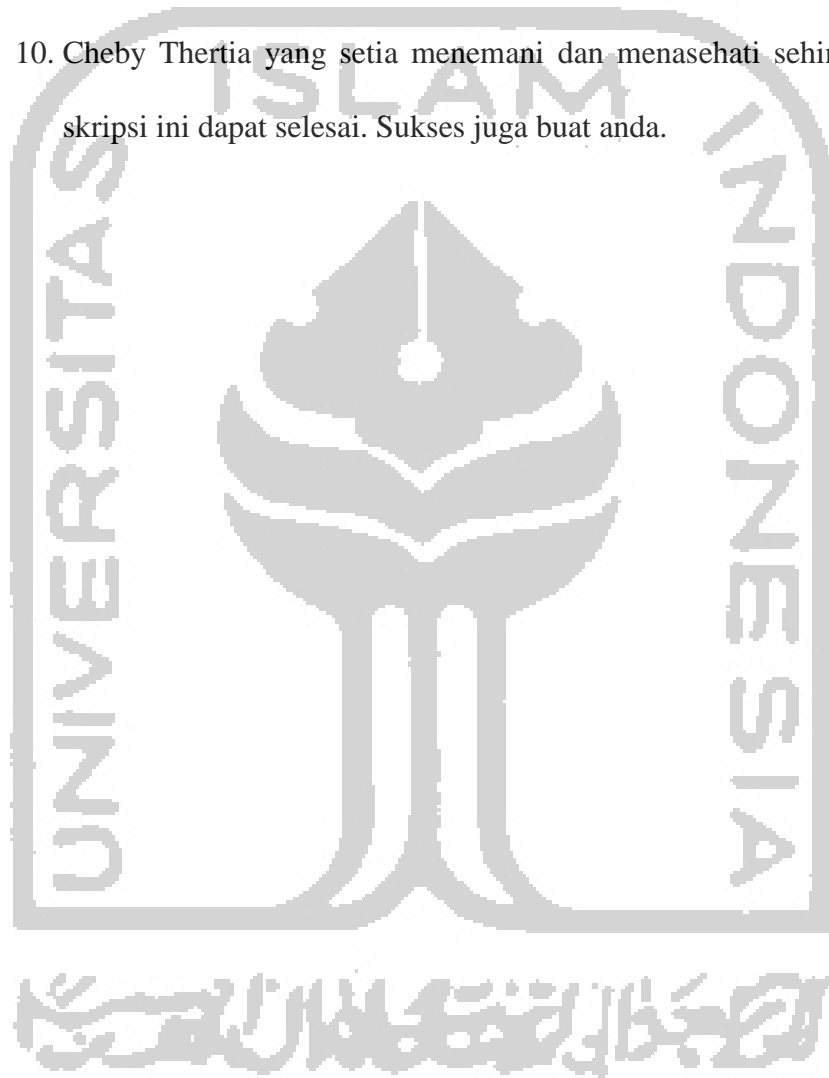
Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian laporan penelitian, penulis menyadari terdapat kekurangan dan kelemahan. Olehkarena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan saran maupun kritik dalam upaya penulis menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan bagi pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SAW yang telah memberi kenikmatan berupa kesehatan, Iman serta Islam yang terus dirasakan kepada penulis hingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan.

2. Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan motivasi dan semangat perjuangan sehingga dapat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ayahanda Sulaiman Ismail dan Ibunda Siti Hasanah tercinta atas kasih sayang, perhatian dan doanya yang selalu dipanjatkan, terimakasih Bapak dan Mama.
4. Kakak Nova Andriani, S.Si., MPP., M.Ec. Dev, Kakak Mailani, S.Si, Kakak Fadjaruddin Nur, S.T dan Adik Muhammad Aidil Asri atas semangat yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Prastowo, S.E.,M.Ec.Dev selaku pembimbing dari penelitian penulis.
6. Seluruh saudara FMIE 2016-2017 atas segala bentuk pengalaman yang dirasakan bagi penulis.
7. Keluarga Besar Ilmu Ekonomi dan teman seperjuangan Naufal As Shidiqi, Fadhil Driya Warasta, Ahmad Syukron, Sri Wisnu Asihanto, Enggar Dwika Rucita Rajawali, Setyo Adi Prabowo, La Ode Muhammad Al Faridzi Putera, Arindra Krisna Andara, Jagatia, Jagadhita Obsidian, Ayu Pramesti, Jamaica Primadara, Ikeu Septiani, Wirawan Satria dan Muhammad Adnan Pratama Annur atas segala pengalaman, bimbingan, serta etos kerja kalian. Terimakasih keluarga.
8. Teman-teman KKN unit 78 dan 79 atas semangatnya.

9. Rekan kerja penulis selama di DPM serta seluruh kakak yang sama-sama berani mendobrak pintu untuk mengubah birokrasi di dalam kampus. Kalian luar biasa.
10. Cheby Thertia yang setia menemani dan menasehati sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Sukses juga buat anda.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.1.1 Penelitian Terdahulu	12

2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.2 Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi	20
2.2.3.1 Ukuran pada Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah.....	22
2.3 Kerangka pemikiran	24
2.4 Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	27
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional	27
3.3 Metode Analisis.....	30
3.3.1 Metode Regresi Data Panel	30
3.3.2 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	32
3.3.3 Uji Statistik.....	33
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	37
4.1 Analisa pada Deskripsi Data Penelitian	37
4.1.1Analisa Deskriptif Data.....	37
4.2 Hasil dan Pembahasan Analisa.....	48
4.2.1 Pemilihan Model Regresi	48
4.3 Pengujian Hipotesis.....	51
4.3.1 Uji t.....	51
4.3.3 Koefisien Determinasi (<i>R-squared</i>).....	52
4.4 Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Implikasi dan Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi PDB Nasional (%) Menurut Pulau Tahun 2012-2014	4
Tabel 1.2 PDRB per Kapita Tahun 2000, 2010, dan 2017 (dalam ribu rupiah)	5
Tabel 1.3 Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Variabel Dependen dan Independen	27
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.2 Hasil Chow Test	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	48
Tabel 4.4 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Gini Ratio, 2009 – 2018	2
Gambar 1.2 Williamson Index Pulau Jawa	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Indeks Williamson Pulau Jawa	36
Gambar 4.2 Indeks Williamson Jakarta	37
Gambar 4.3 Indeks Williamson Jawa Barat	38
Gambar 4.4 Indeks Williamson Jawa Tengah	40
Gambar 4.5 Indeks Williamson Yogyakarta	41
Gambar 4.6 Indeks Williamson Jawa Timur	42
Gambar 4.7 Indeks Williamson Banten	43



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Dengan menggunakan data sekunder dan model regresi panel data, data ruang yang digunakan merupakan beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa dan menggunakan data antar waktu dari tahun 2001-2017. Dengan menggunakan Eviews 9 penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu: Government Expenditure, PDRB, dan *Urban Ratio* yang menunjukkan hasil berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, PDRB, Government Expenditure, Urban Ratio, Index Williamson

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

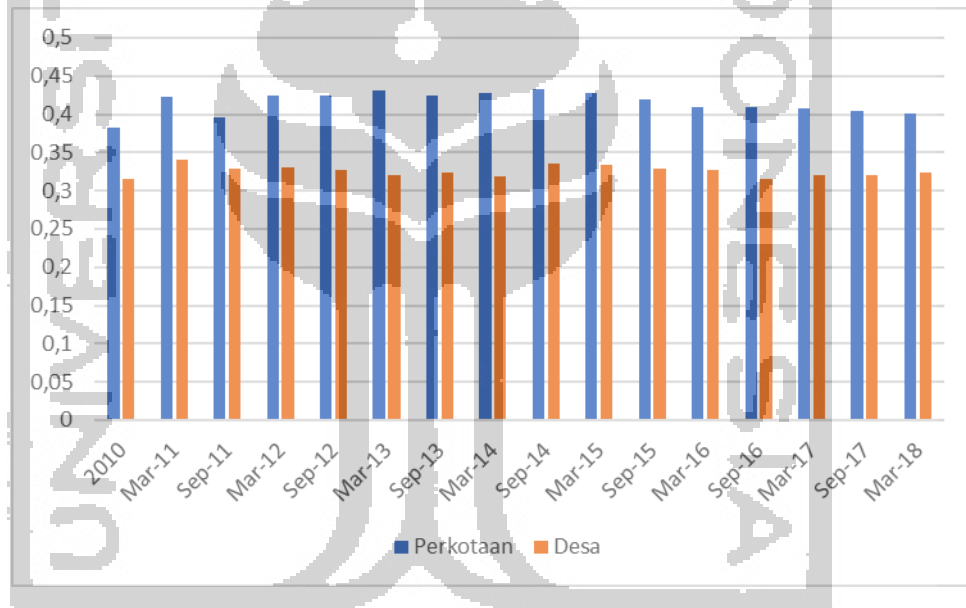
Dua dekade terakhir masalah ketimpangan pembangunan menjadi fokus pemerintah untuk dapat ditanggulangi. Padahal, pembangunan dan pemerataan telah memasuki masa transisi dimana pembangunan dapat tercipta dan mendukung kegiatan ekonomi yang ada. Arsyad (1999:74) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengelola sumberdayanya serta menciptakan kerja sama dengan swasta dalam membentuk lapangan kerja sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang pada wilayah tersebut.

Menurut Rubiarko (2013), dalam proses pertumbuhan ekonomi yang tidak mengikutkan pemerataan ekonomi di dalamnya akan membuat suatu titik dimana akan memisahkan suatu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya. Sebaliknya apabila pemerataan ekonomi tidak bertuju pada pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan gelombang kemiskinan yang ada di lapisan masyarakat.

Kedua hal yang ada pada tujuan ekonomi ini menjadi permasalahan utama yang ada pada negara-negara berkembang. Hal tersebut dirasakan menjadi sangat kompleks dikarenakan antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di rasa sangat penting namun sangat sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang bersamaan. Menurut Sodik (2007) pertumbuhan ekonomi ditentukan hasil dari keseluruhan pola regional yang terbentuk dari kegiatan sosial dan ekonomi sehingga membentuk suatu tujuan yang menjadi cerminan regional tersebut dan mempengaruhi aspek aspek atau kualitas

regional itu sendiri seperti angkatan kerja, pola tingkah laku sosial, sumber daya manusianya, tingkat inflasi dan ekspor netto.

Menurut Kuncoro (2004:203) terdapat dua jenis ketimpangan yang dapat diperhatikan. Yang pertama ialah ketimpangan yang terdapat pada distribusi pendapatan yang ada pada golongan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks gini (*gini ratio*). Pada indeks gini dapat diperhatikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang berbeda di setiap golongannya.



Sumber data: Diolah dari data BPS

Gambar 1.1

Perkembangan Gini Ratio, 2010 – 2018

Diketahui bahwa pola ketimpangan yang ada pada golongan masyarakat di Indonesia mengalami fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2010 hingga 2018 mengalami peningkatan ketimpangan nasional. Diketahui bahwa pada tahun 2011 angka ketimpangan nasional 0,387 naik menjadi 0,41. Angka tersebut pun terus mengindikasikan adanya fluktuasi yang ada pada ketimpangan pendapatan di Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut memiliki arti bahwa kegiatan ekonomi yang ada di perkotaan dan perdesaan mempengaruhi pergerakan ketimpangan ini.

Yang kedua yaitu ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah penting untuk diamati. Dalam kegiatan ekonomi, regional atau daerah berperan sebagai daya tarik atau gravitasi ekonomi. Namun, menurut Kuncoro (2006:223) Kawasan Barat Indonesia (KBI) menjadi gravitasi ekonomi yang ada di Indonesia selama 50 tahun terakhir. Implikasi ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat maka akan berbanding positif dengan laju ketimpangan pendapatan per kapita di suatu negara. Menurut Todaro (2014:219) pada titik awal dari sebuah pembangunan dapat dicirikan dengan meningkatnya pendapatan. Keberhasilan tahap pertama ini juga diiringi dengan meningkatnya Indeks Gini yang berdistribusi dari tingkat pendapatan.

Secara geografis, Pulau Sumatera dan Jawa ialah penyumbang terbesar pembangunan. Tercatat, lebih dari setengah PDB Nasional hanya dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Pasca otonomi daerah diresmikan, ketimpangan antar daerah terus meningkat. Sumbangan PBRD perkapita yang hanya terpusat pada daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga

kepadatan penduduk dan penggunaan sumberdaya alam yang semakin besar. Akibat dari hal tersebut adalah tingkat PDRB per kapita yang tidak merata antar provinsi mengakibatkan pembangunan tidak merata dan meyebabkan ketimpangan.

Tabel 1.1
Distribusi PDB Nasional (%) Menurut Pulau Tahun 2012-2014

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sumatera	23,74	23,81	23,83	21,6	22,03	21,66
Jawa	57,65	57,99	57,78	56,8	58,49	58,4
Bali dan Nusa Tenggara	2,51	2,53	2,54	5,5	3,13	3,54
Kalimantan	9,3	8,67	8,52	6	7,85	8,2
Sulawesi	4,74	4,82	4,9	7,4	6,04	6,1
Maluku dan Papua	2,06	2,18	2,43	2,7	2,46	2,1
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan sumbangan Pulau Jawa yang selalu menyumbang lebih dari setengah distribusi PDB Nasional secara keseluruhan. Hal ini berbanding terbalik dengan pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. Seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, pada tahun 2016 hanya menyumbang 19,48% dari total keseluruhan PDB Nasional pada tahun tersebut. Angka tersebut memiliki menyatakan bahwa adanya ketimpangan antar regional yang terjadi sehingga mengakibatkan sumbangan PDB yang berbeda pada setiap regionalnya.

Di tingkat regional ketimpangan terjadi pada pulau-pulau di Indonesia. Penyumbang PDB terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa sendiri terdapat perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi di dalamnya. Data mencatat penyumbang

pendapatan per kapita terbesar pada Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh Jawa Timur di mana sentra mega industri terpusat pada dua lokasi tersebut.

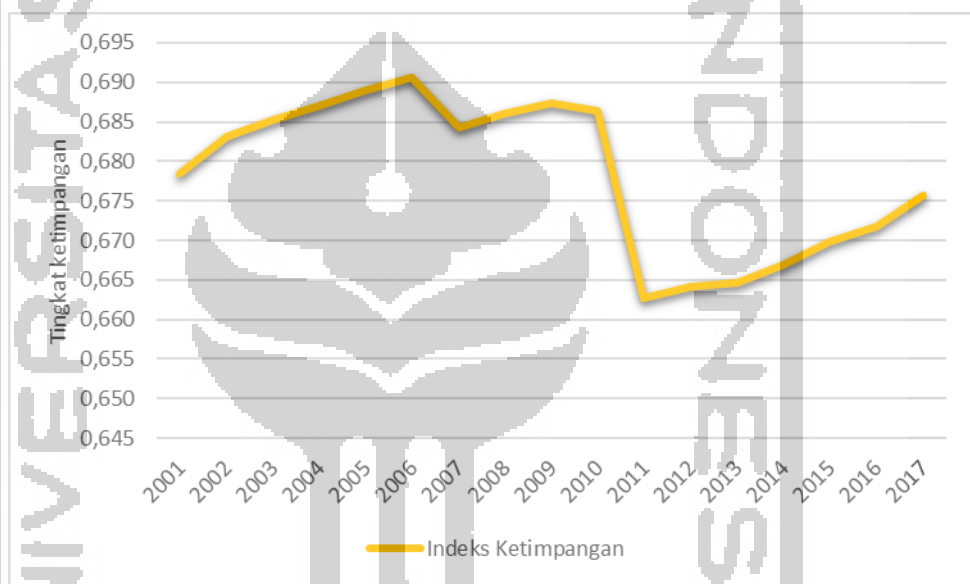
Tabel 1.2
PDRB per Kapita Tahun 2000, 2010, dan 2017 (dalam ribu rupiah)

Wilayah	Tahun		
	2000	2010	2017
DKI JAKARTA	77.148	116.567	170.263
JAWA BARAT	12.461	17.004	31.192
JAWA TENGAH	14.634	23.004	27.608
DI YOGYAKARTA	18.010	25.379	26.695
JAWA TIMUR	16.710	26.107	39.548
BANTEN	20.031	25.527	38.558

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta tercatat mendapatkan poin tertinggi jauh dari daerah lain. Sementara itu, Jawa Timur yang memiliki PDRB posisi kedua setelah DKI Jakarta apabila dilihat dari pendapatannya tidak terlalu mendominasi Pulau Jawa dalam perolehannya. Diketahui bahwa nilai pendapatan per kapita DKI Jakarta tercatat hampir tiga kali lipatnya dari daerah lain yang ada di Pulau Jawa. Hal ini dapat diketahui nilai 170.263 ribu rupiah sangat mendominasi daerah lain yang hanya mencatatkan dalam angka tidak lebih dari 40.000 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antar daerah di Pulau Jawa itu sendiri. Andil daerah dalam penyumbang PDB Nasional juga hanya didominasi oleh beberapa provinsi yang ada di dalamnya.

Kontribusi yang ada tidak membuat Pulau Jawa terlepas dari belenggu ketimpangan. Dengan melihat tingkat ketimpangan dari koefisien Indeks Williamson, tingkat ketimpangan pembangunan yang cukup tinggi. Hal ini menjadikan setiap kegiatan pembangunan yang ada di Pulau Jawa belum dapat menuntaskan ketimpangan pembangunan.



Sumber data: BPS diolah

Gambar 1.2

Williamson Index Pulau Jawa

Gambar 1.2 menunjukkan penurunan tingkat ketimpangan namun cenderung mendekati angka 1 (dimana IW mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi dan IW mendekati 0 maka semakin rendah). Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan ekonomi yang cukup besar pada wilayah tertentu tidak menjamin tingkat ketimpangan antar daerah tidak dapat dihindari adanya.

Tabel 1.3

Kepadatan penduduk (jiwa/km²)

Provinsi	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)		
	2000	2010	2015
DKI Jakarta	12592	15015	15328
Jawa Barat	1010	1282	1320
Jawa Tengah	952	1014	1030
DI Yogyakarta	996	1147	1174
Jawa Timur	727	803	813
Banten	838	1185	1237
Pulau Jawa	17115	20446	20902

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2019

Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa tercatat menjadi paling besar di Indonesia. Menurut data sensus penduduk yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa setiap tahunnya meningkat. Angka tersebut menjelaskan bahwa perekonomian nasional pun terpusat pada Pulau Jawa. Jumlah kepadatan yang terus bertambah dibandingkan dengan indeks ketimpangan pembangunan pada Gambar 1.2 menunjukkan adanya hubungan yang kesinambungan sehingga disaat kepadatan penduduk semakin bertambah, maka tingkat ketimpangan terus bertambah seiring waktunya.

Oleh karena itu, penetapan kebijakan antara pembangunan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatannya selalu terjadi. Dengan hal ini pemerintah dapat bersikap adil dengan mendorong aspek-aspek yang ada pada setiap lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan kesejahteraan yang ada pada seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang terus

menerus terjadi akan menyebabkan kesenjangan antar daerahnya sehingga timbul ketidakpercayaan pada pemerintah dan penumpukan kepadatan masyarakat pada satu lokasi tetap. Dan hal tersebut dapat meningkatkan resiko pada pembangunan daerah yang kepadatan penduduknya terus meningkat tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diduga telah terjadi ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dengan latar belakang di atas maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “*Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2001-2017*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini. Berikut ialah rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa?
2. Apakah tingkat PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa?
3. Apakah rasio penduduk kota berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Berikut ialah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisa hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa.
2. Menganalisa hubungan antara PDRB dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa
3. Menganalisa hubungan antara rasio penduduk kota dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada antar provinsi di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak. Berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan penulis untuk beberapa pihak tersebut, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media menyebarkan pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi khususnya dalam pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Serta sebagai media dalam penerapan ilmu yang penulis sudah dapatkan selama di bangku kuliah kepada khalayak publik.
2. Bagi pihak pemerintah daerah, dalam penelitian ini dapat menggambarkan implikasi ketimpangan terhadap daerah sehingga dapat memilih kebijakan yang tepat dalam penerapannya pada kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitiannya yang selaras dan sejalan dengan penelitian ini sehingga manfaat pertama dapat terus dikembangkan dan menyebar luas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing – masing dijelaskan secara singkat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Bagian tersebut berisi tentang kajian hasil – hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.

2. Landasan Teori

Berisi tentang teori – teori yang digunakan sebagai dasar dalam meneliti permasalahan yang sedang diteliti. Landasan teori tersebut digunakan untuk memberikan pengertian dan konklusi hubungan antara variabel terkait.

3. Hipotesis

Berisi tentang rumusan sementara dari masalah yang disesuaikan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada. Hipotesis disusun dan membentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III Metode Penelitian akan dijelaskan bagaimana metode yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Pada bab ini juga akan dijelaskan secara

sistematika bagaimana hipotesis dapat terbentuk nantinya sehingga dapat di bahas dan dijelaskan di bab selanjutnya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari hasil yang telah dilakukan ujinya menggunakan metode yang di jelaskan pada BAB III Metode Penelitian. Pembahasan hasil dari metode tersebut nantinya akan diselaraskan dengan hipotesis awal yang dibentuk di BAB II sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini nantinya diharapkan menjadi salah satu sumber yang relevan digunakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Mailindra (2017) menjelaskan bahwa keragaman nilai belanja di Provinsi Jambi melalui standar deviasinya menunjukkan angka yang sangat fluktuatif. Pada hasil regresi menunjukkan bahwa nilai keragaman belanja yang jumlahnya fluktuatif tersebut menimbulkan ketimpangan dengan nilai koefisien $2,591E-07$. Angka tersebut memiliki arti apabila belanja naik Rp 1 juta maka ketimpangan naik $2,591E-07$. Pada nilai Indeks Williamson menampilkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Jambi tergolong sedang dengan rata-rata Indeks Williamson 0,3.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Zulfan, dkk (2003) menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi pun sejalan dengan beberapa aspek sosial dan sumber daya alam yang tersedia pada daerah tersebut. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi bukan hanya semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan ekonomi semata, melainkan aspek sosial juga berperan di dalamnya. Beberapa daerah seperti Aceh dan Papua yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak menutup kemungkinan untuk mengalami ketimpangan dengan provinsi yang ada pada regionalnya. Konflik antar suku maupun pemerintah menyebabkan tingkat kemiskinan, kesehatan, dan pembangunan manusia

yang terhambat menyebabkan sumber daya yang tersedia tidak dapat diolah secara maksimal.

Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa koefisien ketimpangan Gini di mana yang memiliki beberapa indikator seperti: pengeluaran rumah tangga (berdasarkan pada pendekatan konsumsi), pendidikan, kesehatan dan beberapa faktor yang tergolong dalam Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bahwa Indeks Gini yang dimiliki Indonesia tergolong rendah. Dari periode tahun 1964-2002 hanya mengalami peningkatan dari 0,31-0,36, di mana itu sangat rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Hal tersebut pun didukung dengan penelitian Aidar (2003) mencatat bahwa pada regional Aceh sendiri terdapat ketimpangan yang relatif tinggi di dalamnya. Hal tersebut ditemukan pada Index Theil pada beberapa daerah di Aceh yang menyentuh angka 1 yang artinya disparitas pendapatan yang terjadi antardaerah di Aceh relatif tinggi.

Pada negara Tiongkok, Sun (2018) menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan yang terjadi pada pendapatan di daerah perkotaan dan pedesaan Tiongkok (tidak termasuk Guangdong, Sahnghai, Tianjian). Ketimpangan tersebut terjadi karena proses ekspor pada perusahaan asing di Tiongkok yang terpusat melakukan pembaharuan teknologi. Disamping itu Sun menjelaskan tingkat urban ratio yang terpusat di beberapa provinsi di Tiongkok juga berakibat pada tingkat ketimpangan yang terus terjadi.

Dalam pembangunan daerah, pada kenyataannya ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia tidak dapat dihindari keberadaannya. Menurut Delis (2009)

pada data analisis deskriptif yang dilakukan telah terjadi peningkatan ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat dinyatakan bahwa nilai Index Wiliamson pada tahun 1990 pada titik 0,491 dan terus melebar hingga tahun 2000 yang menyentuh angka 0,66. Hal ini justru lebih kecil ketimbang saat krisis terjadi. Pada tahun 1997, puncak ketimpangan pendapatan berada pada 0,69. Hal ini dikarenakan krisis mulai melanda Indonesia yang menyebabkan produk domestik bruto di Indonesia turun sehingga pendapatan perkapita masyarakat juga relatif turun dan pada akhirnya memperkeruh tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Berbeda dengan hal tersebut, Soseco (2010) peneliti menggunakan metode deskriptif. Soseco (2010) menjelaskan bahwa data Indeks Theil yang ada sehingga menukan hasil bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di Indonesia turun. Penelitian tersebut mengasumsikan bahwa Indonesia terbagi atas 6 wilayah yang terdiri atas: Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi dan Wilayah Maluku-Papua. Pada penelitian tersebut, disebutkan bahwa periode penelitian terjadi pada tahun 1996-2006. Ketimpangan yang ada pada penelitian tersebut dibagi atas dua kawasan utama besar yaitu Barat dan Timur.

Pada data, tercatat kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia pada Indeks Theil cenderung menurun. Pada kedua kawasan besar yaitu Indonesia bagian Barat dan Timur didapat nilai rata-rata Indeks Theil yang ada di Indonesia pada tahun 1996-2006 terdapat pada titik 0,16. Ketimpangan yang terjadi diakibatkan oleh 74%

dari ketimpangan yang terjadi didalam kawasan antar provinsi, sedangkan 26% sisanya disebabkan oleh antar provinsi. Adanya temuan ketimpangan antar provinsi pada kawasan diakibatkan oleh konvergensi pendapatan yang terjadi pada provinsi-provinsi yang mampu meningkatkan tingkat pendapatan perkapitanya.

Khairunnisa (2016) menjelaskan pada analisis *Klassen Typologi* menunjukkan pada periode 2001-2005 dan 2006-2010 telah membentuk pola baru pembangunan selama periode-periode tersebut. Hal tersebut pun sejalan dengan Indeks Wiliamson yang menunjukkan bahwa terdapat tujuh kecamatan yang memiliki nilai indeks yang menurun dan 14 kecamatan yang memiliki nilai indeks yang naik dengan nilai Indeks Wiliamson antar kecamatan yang tergolong rendah dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0.16994. Namun hal ini tidak dapat menutup kemungkinan dalam kenaikan ketimpangan pembangunan ekonomi yang terus meningkat antar kecamatannya yang dikarenakan nilai Indeks Wiliamson yang relatif naik.

Wadji (2011) Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa komposisi penyebab ketimpangan yang ada di Sulawesi Selatan disumbangkan oleh ketimpangan yang terjadi pada kabupaten atau kota yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Theil dalam daerah lebih besar ketimbang nilai Theil antar daerah. Nilai Diversitas Entropi juga menunjukkan bahwa penyebab ketimpangan tersebut disebabkan oleh karena kurang meratanya sektor-sektor ekonomi serta kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan ketimpangan dalam kabupaten atau kota dan menumbangkan ketimpangan tersebut untuk tingkat Sulawesi Selatan.

Nugroho (2014) menjelaskan pada Tipologi Klassen melalui nilai rata-rata pertumbuhan ekonominya dapat menggambarkan bahwa terdapat tujuh kecamatan yang memiliki daya tumbuh cepat, lalu terdapat empat kecamatan dengan daya tumbuh cepat namun tertekan. Setelahnya terdapat satu kecamatan yang berkembang cepat namun masih terdapat 15 kecamatan yang masih tertinggal.

Hal ini menggambarkan bahwa adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi antar kecamatan dalam Kabupaten Banyumas. Begitupun jika diujikan menggunakan Indeks Wiliamson. Melalui dasar perhitungan dengan memperhitungkan antara PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kecamatan, maka dapat diambil data bahwa nilai ketidakmerataan masih relatif tinggi. Nilai Indeks Wiliamson yang menyentuh angka rata-rata lebih dari 0.550424 mengimplikasikan bahwa terdapat ketimpangan yang relatif tinggi antar wilayah.

Hal tersebut pun memiliki korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas apabila menggunakan Uji Korelasi Pearson. Uji Korelasi Pearson menjelaskan jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka ketimpangan pendapatan akan terus melebar, hal tersebut berlaku sebaliknya. Hal itu pun berlaku pada Uji Granger yang mengetahui ada hubungan antara Indeks Wiliamson dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan apabila Indeks Wiliamson naik maka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Banyumas akan relatif naik.

Vu (2016) menggunakan Indeks Theil, Indeks Koefisien Gini, dan Koefisien variabel tertimbang diantara kedua indeks tersebut. Pada pembahasannya dengan

menggunakan beberapa variabel tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan perkapita pada setiap sub-grup. Penemuan tersebut terjadi pada tahun 1990-1994, dan beberapa provinsi disamping Kota Ho Chi Minh tetapi pada sub-periode 2004-2011, dimana semua provinsi mengindikasikan terpusat pada periode tersebut. Pada penelitian tersebut ditemukan pada 5 sub-grup tersebut terdapat beberapa provinsi termiskin yang cenderung berlokasi secara geografis dan ekonomi terpencil di Vietnam.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Alat	Hasil penelitian
1.	Delis (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • Index Williamson 	Analisis deskriptif kuantitatif	Tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia terus melebar dari tahun 1990 hingga tahun 2000.
2.	Zulfan, dkk (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Indeks Gini • Index Entropi Theil • GRDP 	Analisis deskriptif kuantitatif	Ketimpangan Indeks Gini tahun 1993-1999 memiliki rata-rata 0.41 dan ketimpangan Indeks Willimson 1.07.
3.	Aidar (2003)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Indeks Entropi Theil 	Regresi data <i>time series</i>	Pendapatan per kapita memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan.

4.	Soseco (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Entropi Theil 	Analisis deskriptif kuantitatif	Ketimpangan yang terjadi antar kawasan menyumbang 74% tingkat ketimpangan dan 26% sisanya disumbangkan oleh ketimpangan antar provinsi dalam kawasan.
5.	Khairunnisa (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen • Index Williamson 	Analisis deskriptif kuantitatif	Indeks Williamson memiliki nilai rata-rata indeks sebesar 0.16994.
6.	Wadji (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Indeks Theil • Pertumbuhan PDRB • Rasio Belanja provinsi 	Regresi linier berganda	Ketimpangan yang terjadi Belanja Pemerintah relatif mengurangi ketimpangan. Dan tingkat diversitas Entropy antar wilayah masih tergolong tinggi karena nilai rata-rata entropi 0.78 atau mendekati 1
7.	Nugroho (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PDRB • Tipologi Klassen • Indeks Williamson 	Analisis Trend (<i>time series</i>)	Trend pertumbuhan ekonomi selama tahun 2002 hingga 2011 mengalami kenaikan setiap

				tahun.
8.	Mailindra (2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks williamson • Anggaran belanja pemerintah 	Analisis data trend (<i>time series</i>)	Terdapat hubungan positif antara variasi belanja pemerintah dan ketimpangan pembangunan.
9.	Vu (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Wiliamson • Indeks Theil • Entropi • Koefisien gini • Investasi Langsung Asing • Investasi Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel • Analisis data kuantitatif 	Investasi langsung asing dan dalam negeri memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah
10.	Sun (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan pendapatan penduduk desa dan kota • Tingkat ekspor • Faktor Z seperti investasi dan kebijakan pemerintah 	Analisis data panel dinamis	Tingkat pendapatan penduduk diketahui bahwa tingkat ketimpangan dari pendapatan penduduk kota dan desa.

Peneliti menggunakan rujukan utama pada penelitian Mailindra (2017) dengan perbedaan pada periode penelitian. Pada penelitian ini terdapat tambahan variabel yang merujuk pada penelitian Zulfan (2003) dan Sun (2018) yaitu PDRB dan rasio penduduk kota.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013:9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan dari perkembangan dari kegiatan dalam perekonomian yang dapat menyebabkan

meningkatnya jumlah barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi menjadi pandangan permasalahan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menambah kapasitas produksi barang dan jasa ini. Pertama, penambahan faktor-faktor produksi seperti bahan baku dan jumlah karyawan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang tersedia sehingga jumlah produksi dapat terus meningkat. Kedua, dalam meningkatkan kapasitas produksinya, modal melalui tingkat investasi menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga jumlah produksi dapat ditingkatkan. Teknologi yang terus berkembang dapat menjadi salah satu faktor selain menambah tingkat produksi, teknologi dapat mengambil andil dalam efisiensi dalam penggunaan faktor produksi yang tersedia.

Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, sangat sukar dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila dilihat dari tingkat produktifitasnya. Oleh karena itu, dalam pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional yang dicapai pada beberapa periode menjadi ukuran yang digunakan dalam penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.2 Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Sjarizal (2008:104) ketimpangan antar daerah terjadi dikarenakan adanya perbedaan kondisi sumberdaya alam dan demografi. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah terdapat perbedaan. Aspek ini memiliki implikasi terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah sehingga

ketimpangan pembangunan wilayah terjadi secara signifikan. Oleh karena itu, formulasi dalam penentuan kebijakan pembangunan oleh pemerintah secara teoritis mengacu pada tingkat ketimpangan yang terjadi.

Ilmuan Neo-Klasik, Douglas C. North dalam Teori Pertumbuhan Neo-klasik menjelaskan hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalamnya. Teori ini sering disebut Hipotesa Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-klasik pada proses awal pembangunan suatu negara cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalamnya proses ini akan terjadi terus-menerus hingga mencapai suatu titik puncak. Dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa negara-negara yang sedang berkembang akan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara telah maju. Pada negara maju tersebut kurva ketimpangan pembangunan memiliki bentuk seperti U terbalik.

Terdapat alasan yang menyebabkan negara sedang berkembang mengalami ketimpangan antar wilayah yaitu peluang pembangunan pada umumnya dimanfaatkan oleh wilayah yang memiliki kondisi pembangunan yang sudah baik seperti sarana, prasarana serta sumberdaya manusia yang berkualitas baik dan memiliki sumber daya alam yang memadai. Sebaliknya, pada daerah-daerah yang terbelakang dan tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang pembangunan dikarenakan perbedaan sumber daya alam maupun perbedaan sumberdaya manusia yang ada menyebabkan keterbatasan pembangunan di wilayah terbelakang tersebut. Hal ini membuat wilayah

yang memiliki peluang tersebut akan semakin maju sedangkan wilayah yang terbelakang tetap keadaan awalnya.

Berbeda dengan negara yang telah maju pada umumnya kondisi daerah telah lebih baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas sumberdaya manusianya. Disamping itu negara-negara maju tidak memiliki hambatan-hambatan baik dari segi budaya maupun sosial sehingga proses pembangunan tidak memiliki hambatan sama sekali. Dengan demikian pembangunan antar daerah jauh akan lebih merata ketimbang negara yang sedang berkembang. Ekonom lain menguji Teori Ekonomi Pertumbuhan Neo-klasik ini. Jeffrey G. Williamson menguji Teori Ekonomi Pertumbuhan Neo-Klasik melalui uji data time series maupun cross-section. Hasil menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik memiliki formulasi secara teoritis maupun bukti secara empirik. Olehkarena itu, setiap awal proses pembangunan tidak selamanya mengurangi tingkat ketimpangan yang ada melainkan pada tahap permulaan justru menciptakan ketimpangan.

2.2.3.1 Ukuran pada Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Terdapat beberapa cara dalam menentukan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ukuran dari ketimpangan tersebut dapat digunakan sebagai acuan maupun visi bagi pemerintah daerah untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan pada daerah atau wilayah tersebut. Terdapat dua indeks yang sering digunakan dalam penelitian antara lain:

A. Indeks Williamson

Dalam penentuan ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah pertama kali ialah williamson indeks di mana studi ini dilakukan pada tahun 1966 oleh Jeffrey G. Wiliamson. Secara statistik indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang secara lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Williamson menggunakan teknik ini dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah. Indeks ini memiliki kelemahan di mana memiliki tingkat sensitifitas tinggi terhadap definisi wilayah yang digunakan pada perhitungan. Walaupun demikian Indeks ini dinilai cukup lazim untuk digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah. Williamson Index menggunakan data PDRB per kapita sebagai data dasar. Hal ini digunakan untuk menghitung tingkat pembangunan antar wilayah dan tingkat kemakmuran antar kelompok dalamnya.

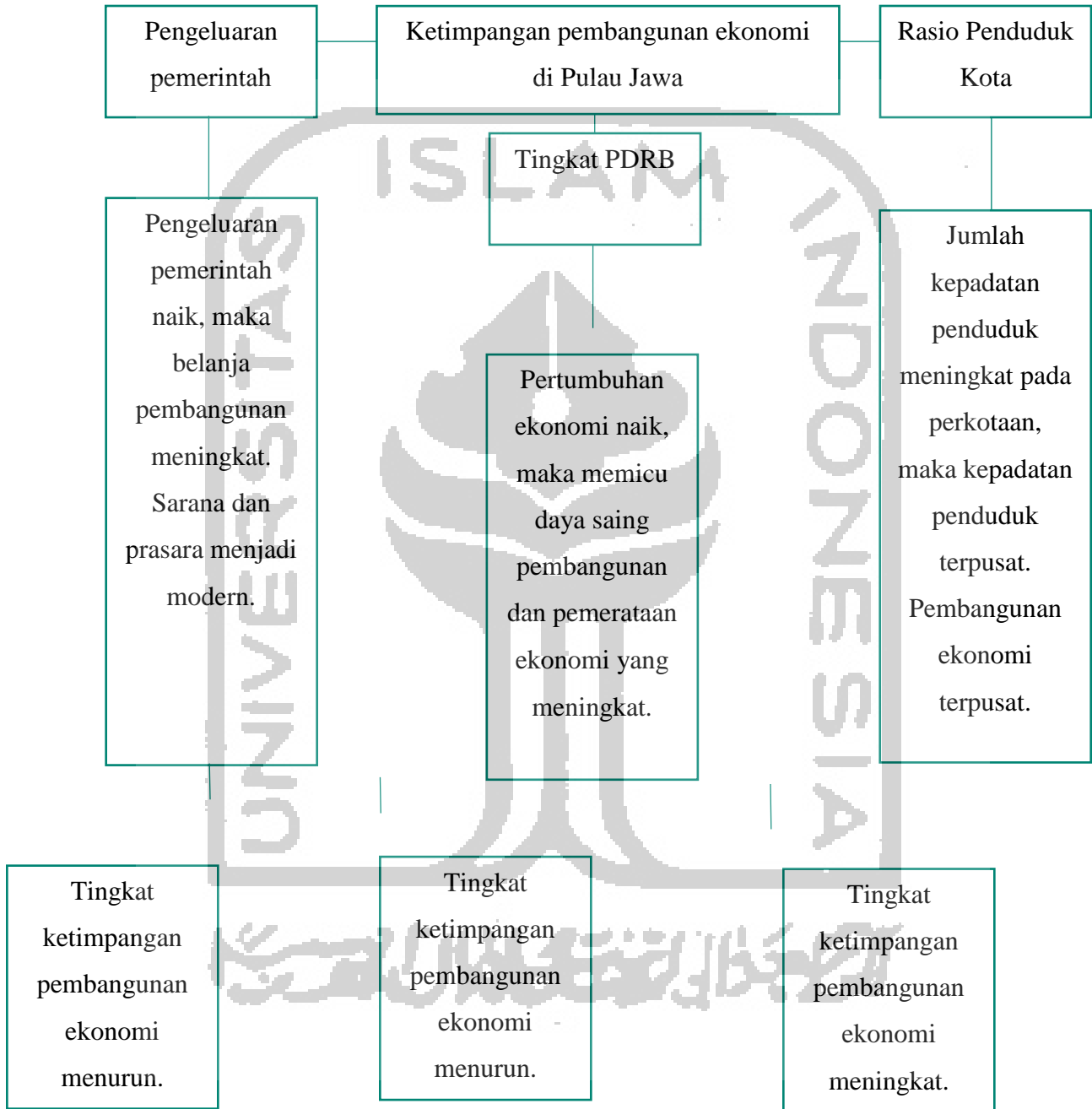
B. Indeks Theil

Indeks lain yang biasanya digunakan oleh peneliti dalam mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah adalah Theil Index. Sama dengan Indeks Williamson dalam perhitungannya Indeks Theil menggunakan PDRB per kapita sebagai satuan hitung dan jumlah penduduk. Indeks Theil memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Yang pertama, cakupan analisa dapat lebih luas. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan Indeks Theil digunakan untuk menghitung ketimpangan dalam daerah maupun antar daerah sekaligus. Yang kedua, penggunaan indeks ini dapat menghitung besar kontribusi pembangunan suatu wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan visi pada kebijakan pembangunan daerah.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan hipotesa penelitian dan studi pustaka yang dilakukan maka dibentuk beberapa kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran dijelaskan bagaimana suatu variabel dependen dapat mempengaruhi variabel independen. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dibentuk peneliti dari studinya, yaitu:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Setelah melihat kajian pustaka dan landasan teori sehingga membentuk sebuah kerangka pemikiran, maka dalam penelitian ini analisis menggunakan hipotesis yang merupakan dugaan sementara sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pemerintah diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa.
- b. PDRB diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa.
- c. Rasio penduduk kota diduga memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa.

BAB III

METODELOGI DAN PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder meliputi data-data yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik dan otoritas jasa keuangan maupun lainnya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan data panel yang ada pada pulau Jawa pada kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2017. Data kuantitatif yang dikumpulkan merupakan data yang berwujud dalam bentuk angka-angka sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua ataupun penyedia data yang telah diolah. Data sekunder di sini merupakan bagian dari *cross section* yang diambil dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan data antar waktu yang digunakan dalam kurun waktu 2001 hingga 2017 merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu kurun waktu tertentu dari sampel yang ada.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional

Variabel penelitian merupakan bagian dari penelitian. Defenisi oprasional yang ada pada penelitian merupakan sebuah ide dalam penyelesaian masalah dari hipotesis yang sementara dibentuk dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, menggunakan tiga variabel dependen dan variabel independen. Berikut merupakan defenisi oprasional dan variabel yang digunakan pada penelitian yang dijelaskan pada tabel variabel.

Tabel 3.1

Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Satuan	Sumber Data
Ketimpangan Pembangunan (IW)	Indeks Williamson	BPS diolah
Pengeluaran Pemerintah (GOV)	Juta/tahun	DJPK Kementerian Keuangan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tahun dasar 2010	Juta/tahun	BPS diolah
Rasio Penduduk Kota (UR)	Persentase (%)	BPS diolah

$$I_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{y}} \quad 0 < I_w < 1$$

di mana: I_w = Indeks Ketimpangan Williamson
 y_i = PDRB perkapita daerah i
 y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah
 f_i = Jumlah penduduk daerah i
 n = Jumlah penduduk seluruh daerah

1. Pengeluaran pemerintah daerah (*Government Expenditure*) menjadi salah satu variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada bagian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, terdapat bagian pengeluaran atau belanja pemerintah. Menurut data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,

pengeluaran baik rutin maupun untuk proyeksi pembangunan daerah tercatat pada anggaran yang terdapat pada pemerintah daerah itu sendiri.

2. PDRB merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam menentukan kebijakan keuangan maupun belanja dan pemasukannya. Sukirno (2006:61) menjelaskan bahwa nilai PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dan memiliki nilai yang dihitung dari harga riil maupun harga berlaku. Pada penelitian ini, data PDRB menggunakan PDRB riil dengan harga konstan tahun 2010
3. Rasio Penduduk Kota (*Urban Ratio*) merupakan rasio penduduk yang tinggal menuju arah kepada urbanisasi. Hal ini ditandai dengan kepadatan penduduk mulai meningkat sehingga wilayah yang sebelumnya ialah perdesaan telah menjadi perkotaan. Transisi penduduk yang terjadi dijelaskan pada laporan sensus penduduk per sepuluh tahunan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut *Decentralization Support Facility*, rasio penduduk kota pada suatu kawasan dapat mencerminkan bagaimana desain dari kebijakan pembangunan pada daerah tersebut. Rasio penduduk kota dapat diketahui melalui membandingkan jumlah penduduk yang terdapat di kota dengan jumlah penduduk pada provinsi tersebut.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian merupakan analisa kuantitatif regresi menggunakan metode data panel dengan estimasi Metode Ordinary Least Squares menggunakan alat pengolahan data yaitu program Eviews 9.

3.3.1 Metode Regresi Data Panel

$$I_{wit} = \beta_0 + \beta_1 GOV_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 UR_{it} + U_{it}$$

di mana:

I	=	Index williamson
β_0	=	Koefisien intersep
β_1	=	Koefisien pengaruh <i>Government Expenditure</i>
β_2	=	Koefisien pengaruh PDRB
β_3	=	Koefisien pengaruh <i>Urban Ratio</i>
U	=	Variabel pengganggu
i	=	Provinsi di Pulau Jawa (6 provinsi)
t	=	Tahun Observasi

Dalam menggunakan regresi data panel, terdapat beberapa asumsi model yang harus diteliti terlebih dahulu. Adapun model-model tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Common Effect Model* (CEM)

CEM atau *pooled least square* merupakan salah satu pendekatan yang paling sederhana. Dikatakan demikian, menurut Gujarati (2012:239) pada CEM regresi cukup besar dapat dilakukan tanpa mementingkan sifat dari *cross section* maupun

time series pada data. Berdasarkan asumsi tersebut maka didapat persamaan pada *Common Effect Model* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + u_{it}$$

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) memperhatikan setiap observasi pada unit *cross section* pada model regresi memperoleh nilai yang berbeda pada setiap intersepnnya. Berbeda dengan CEM, nilai heterogenitas antar unit *cross section* diperkenankan dengan memberi entitas pada nilai setiap intersepnnya. Meskipun memiliki intersep yang berbeda-beda untuk tiap-tiap subjek, namun intersep tiap entiti tidak akan berubah seiring waktu dan akan tetap mengasumsikan slope koefisien yang tetap pula. Olehkarena itu, pada asumsi ini maka diperoleh persamaan *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + u_{it}$$

3. *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model mengasumsikan bahwa terdapat variabel acak pada α_i yang memiliki nilai rata-rata α_1 dengan tanpa notasi i pada koefisiennya, sehingga dapat diasumsikan bahwa nilai intersep $\alpha_{1i} = \alpha_1 + e_i$ di mana, e_i merupakan error acak dari rata-rata nol serta variansi error tidak tercantum secara langsung pada obsevasi atau biasa disebut variabel laten. Dengan menybtitusi asusmsi dari model tersebut maka persamaan dari *Random Effect Model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \beta X_{it} + u_{it}$$

3.3.2 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penentuan model yang akan digunakan, maka dilakukan beberapa uji untuk pemilihan yang dibutuhkan metode pendekatan estimasi yang sesuai serta memiliki nilai regresi yang baik. Dalam penentuan model antara CEM atau FEM menggunakan uji Chow sehingga didapat hasil regresi terbaik antar keduanya. Sedangkan dalam menentukan model FEM atau REM maka harus dilakukan uji Hausmen di mana hasil regresi akan terlihat nilai yang lebih baik diantara kedua uji tersebut.

3.3.2.1 *Chow Test* (Uji Chow)

Chow test atau Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan suatu model apakah lebih baik *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Berikut merupakan hipotesa dari Uji Chow:

$$H_0: \text{Common Effect Model}$$

$$H_1: \text{Fixed Effect Model}$$

Dasar Penolakan terhadap hipotesis di atas ialah dengan cara membandingkan probabilitas *F-statistic* dengan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Apabila probabilitas *F-statistic* lebih besar dari nilai alpha maka H_0 diterima maka model yang paling baik adalah *Common Effect Model*. Begitupula sebaliknya apabila probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari nilai alpha maka H_0 ditolak maka model yang paling baik digunakan adalah *Fixed Effect Model* (Nuryanto, 2013:86).

3.3.2.2 Hausman test (Uji Hausman)

Pada Uji Hausman dilakukan setelah mengetahui bahwa pada Uji Chow menolak H_0 dan menerima H_1 yaitu model *Fixed Effect*. Selanjutnya pada Uji Hausman model tadi diuji kembali membandingkan probabilitasnya dengan *Random Effect Model*. Sehingga berikut adalah hipotesis dari Hausman:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Keputusan yang diambil berdasarkan berdasarkan perbandingan antara nilai probabilitas Uji Hausman dengan nilai alpha ($\alpha=0,05$). Apabila nilai probabilitas Uji Hausman lebih besar dari nilai alpha maka H_0 diterima artinya metode regresi yang paling baik adalah *Random Effect Model*. Dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas Uji Hausman lebih kecil dari nilai alpha maka H_1 yang diterima. Hal tersebut berarti metode regresi yang lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*.

3.3.3 Uji statistik

Dalam Uji Analisis Statistik bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi dan kebaikan yang sesuai (goodness of fit) variabel-variabel yang diteliti. Dengan demikian dalam menjelaskan tingkat signifikansi dan kebaikan tersebut dilakukan uji sebagai berikut, yaitu:

1. Uji Signifikansi Koefisien Regresi: Uji t

Dalam menguji sejauh mana setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Y) maka dilakukan uji t untuk mengetahuinya. Pada penelitian ini

menggunakan satu sisi Uji t (1-tailed) yang menjelaskan bahwa setiap sisi dari uji t tidak mempengaruhi hasil uji. Berikut hipotesis secara individunya, yaitu:

a. Variabel Pengeluaran Pemerintah

$H_0: \beta_1 \geq 0$, variabel pengeluaran pemerintah tidak memengaruhi variabel ketimpangan pembangunan.

$H_1: \beta_1 < 0$, maka terdapat variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

b. Variabel PDRB

$H_0: \beta_2 \geq 0$, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PDRB terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

$H_1: \beta_2 < 0$, variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

c. Variabel Rasio Penduduk Kota

$H_0: \beta_3 \geq 0$, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Rasio Penduduk Kota terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

$H_1: \beta_3 < 0$, maka terdapat variabel Rasio Penduduk Kota berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dari variabel terhadap t kritisnya. Apabila t hitung $<$ t kritis maka variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen. Dan sebaliknya apabila t hitung $>$ t kritis maka

dapat menolak H_0 . Hal tersebut memiliki arti variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya (Widarjono, 2009: 69).

2. Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji F)

Uji signifikansi keseluruhan (*overall significance*) merupakan pengujian pada hipotesis dari garis regresi yang diobservasi untuk mengetahui apakah koefisien Y berhubungan baik dengan seluruh variabel-variabel independen pada model dengan asumsi apabila F hitung lebih besar daripada nilai F kritis, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh pada variabel dependen (Gujrati 2012:305). Pada penelitian ini hipotesis yang digunakan yaitu:

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 = paling sedikit 1 koefisien tidak sama

Hasil uji dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas *f-statistic* dengan α ($\alpha = 5\% = 0,05$). Jika probabilitas *f-statistic* lebih kecil dari α , maka akan menolak H_0 . Olehkarena itu, keseluruhan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Determinasi (R^2)

Secara definisi, R^2 mengukur proporsi dari variasi pada variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Pada uji determinasi ini digunakan untuk mengukur sebesar apa persentase dari model regresi yang mampu dijelaskan oleh variabel dependennya (Gujrati 2012:256). Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$) maka semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel independen

menjelaskan variabel dependen. Dan sebaliknya, apabila R^2 mendekati 0 maka semakin kecil variasi dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Analisa pada Deskripsi Data Penelitian

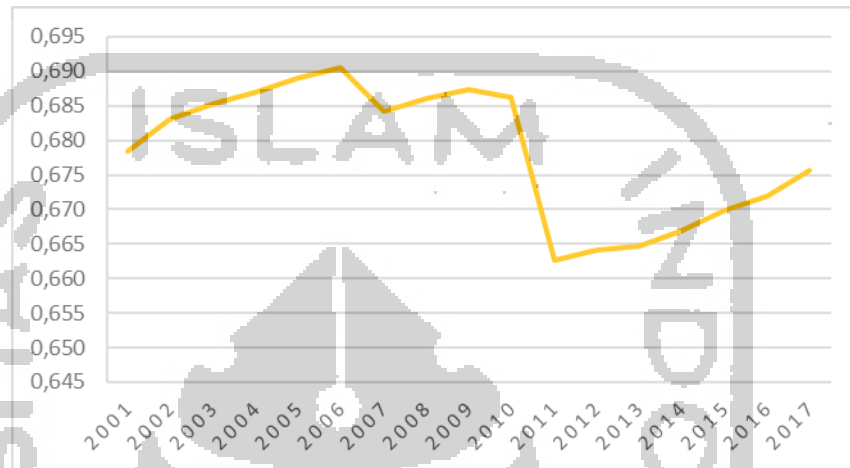
Pada analisis ini akan menjelaskan hubungan tingkat ketimpangan pembangunan ini melalui variabel terikat Indeks Williamson pada beberapa variabel bebas di Pulau Jawa menggunakan data panel. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari setiap provinsi di di Pulau Jawa selama 18 tahun dan menggabungkan beberapa data tersebut menjadi suatu data panel sehingga dapat di uji tingkat pengaruhnya. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini antara lain: PDRB setiap provinsinya, rasio penduduk kota, dan pengeluaran pemerintah. Pengaruh variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat yaitu Indeks Williamson.

Dalam analisis ini akan memberikan pemahaman tentang hubungan dari hasil-hasil data yang diperoleh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

4.1.1 Analisa Deskriptif Data

Penjelasan setiap variabel dimulai dari Indeks Williamson yang ada pada Pulau Jawa. Indeks Williamson menjelaskan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada pada tiap provinsi di Pulau Jawa. Dalam penelitian dijelaskan bahwa terdapat tingkat ketimpangan yang terjadi di Pulau Jawa selama tahun 2001-

2017. Penjelasan tingkat ketimpangan pembangunan yang ada di Pulau Jawa tersebut dijelaskan melalui Gambar 4.1.



Sumber: BPS diolah

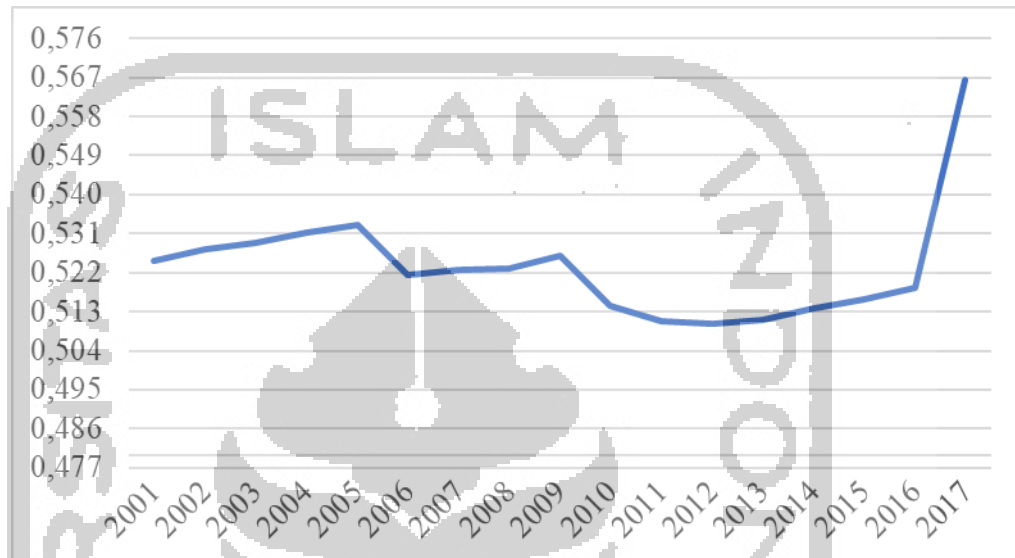
Gambar 4.1

Indeks Williamson Pulau Jawa

Gambar 4.1 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Pada Gambar 4.1 rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Pulau Jawa berada pada titik 0,678. Angka tersebut terhitung tinggi apabila mendekati satu. Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Jawa berada pada tahun 2006. Gambar 4.1 menunjukkan pada tahun 2006 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,691.

Ketimpangan pembangunan ekonomi menurun tajam pada tahun 2011. Diketahui bahwa pada tahun 2011 menjadi titik terendah tingkat ketimpangan ekonomi yang ada di Pulau Jawa tepatnya pada titik 0,663. Hal ini sekaligus menjadikan tren positif dalam pemerataan yang ada pada Pulau Jawa. Namun baiknya

tren tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga ketimpangan pun merangkak naik secara terus menerus.



Sumber : BPS diolah Excel

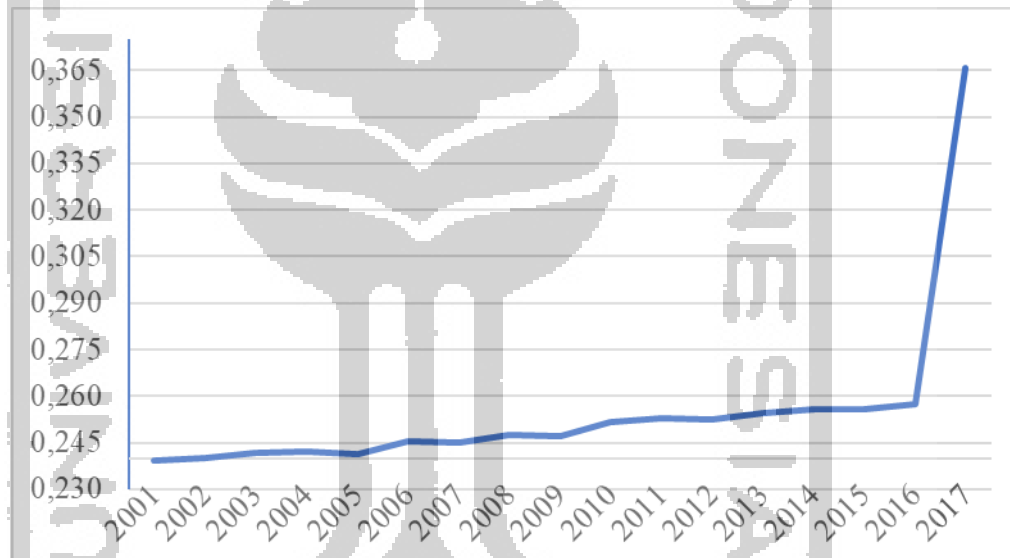
Gambar 4.2

Indeks Williamson Jakarta

Gambar 4.2 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pada Gambar 4.2 rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi DKI Jakarta berada pada titik 0,523. Angka tersebut terhitung tinggi apabila mendekati satu.

Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi DKI Jakarta berada pada tahun 2017. Gambar 4.2 menunjukkan pada tahun 2017 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,566. Pada DKI Jakarta titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi pada tahun 2012 yaitu pada titik 0,510.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2001 mengalami kenaikan ketimpangan hingga 2005. Namun ketimpangan pembangunan ekonomi membaik setelah tahun 2005 hingga ketitik terendah pada tahun 2012. Perbaikan ekonomi tersebut tidak bertahan lama. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta kembali memburuk setelahnya. Memburuknya perekonomian tersebut ditandai dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2017.



Sumber: BPS diolah Excel

Gambar 4.3

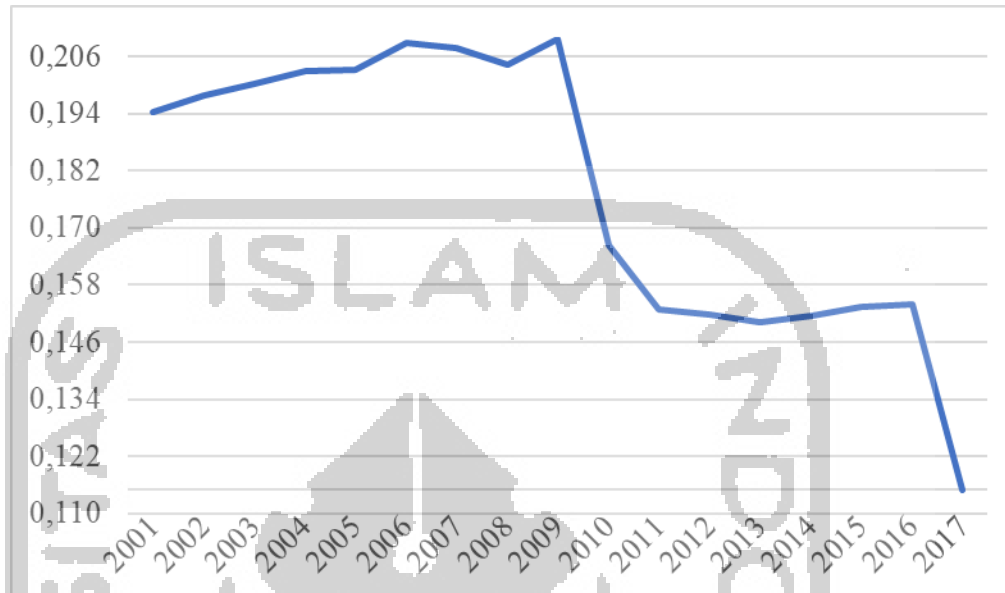
Indeks Williamson Jawa Barat

Gambar 4.3 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Jawa Barat berada pada titik

0,255. Angka tersebut terhitung rendah apabila dilihat dari nilai Indeks Williamsonnya.

Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat berada pada tahun 2017. Gambar 4.3 menunjukkan pada tahun 2017 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,366. Pada Provinsi Jawa Barat titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi pada tahun 2001 yaitu pada titik 0,239.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat yang fluktuatif dan mempunyai kecenderungan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat selama tahun penelitian, tingkat Indeks Williamson yang menunjukkan ketimpangan ekonomi selalu meningkat setiap tahunnya. Namun ketimpangan pembangunan ekonomi stagnan pada tahun 2003 hingga 2004 pada titik 0,242, 2008 hingga 2009 pada titik 0,247 dan 2014 hingga 2015 pada titik 0,56. Hal tersebut tidak membuat perekonomian Provinsi Jawa Barat membaik. Ditandai dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2017, menunjukkan pengelolaan pembangunan ekonomi yang masih belum baik di provinsi tersebut.



Sumber : BPS diolah Excel

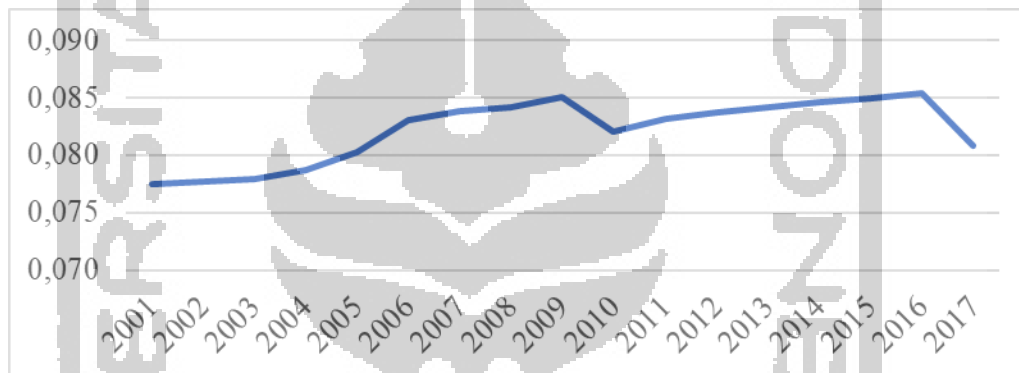
Gambar 4.4

Indeks Williamson Jawa Tengah

Gambar 4.4 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pada Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Jawa Tengah berada pada titik 0,178. Angka tersebut terhitung rendah apabila dilihat dari nilai Indeks Williamsonnya. Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat berada pada tahun 2009. Gambar 4.3 menunjukkan pada tahun 2009 tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi melalui Indeks Williamson berada pada titik 0,210. Pada Provinsi Jawa Tengah titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi pada tahun 2017 yaitu pada titik 0,110.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2001 hingga tahun 2009

menunjukkan tingkat ketimpangan yang terus melebar. Namun ketimpangan pembangunan ekonomi membaik setelah tahun 2009 perekonomian membaik kembali hingga tahun 2013. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan ekonomi sempat memburuk dengan naiknya indeks ketimpangan dari tahun 2014 hingga 2016 ke titik 0,154. Selanjutnya, ketimpangan dalam pembangunan ekonomi kembali membaik pada tahun 2017.



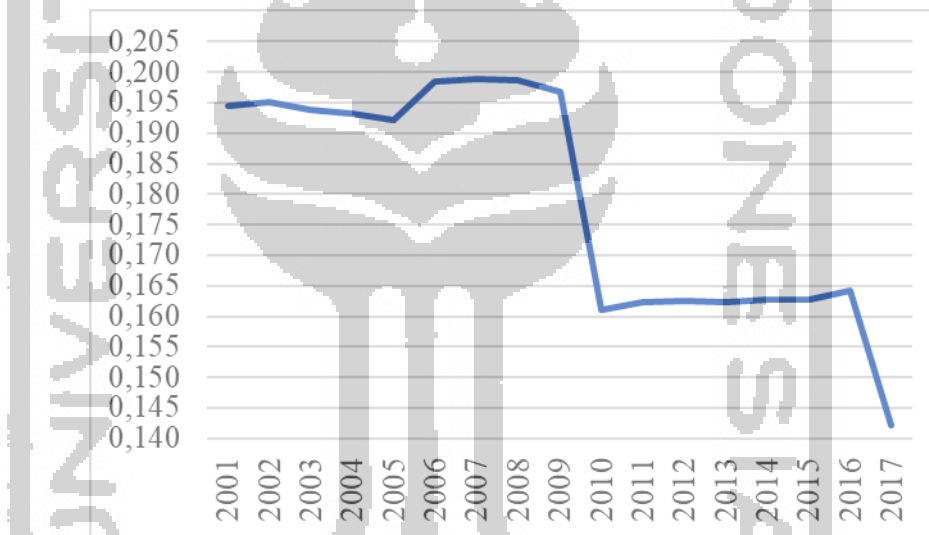
Sumber : BPS diolah Excel

Gambar 4.5

Indeks Williamson Yogyakarta

Gambar 4.5 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta. Pada Gambar 4.5 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Yogyakarta berada pada titik 0,082. Angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi rendah karena mendekati angka 0. Tingkat tertinggi ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta berada pada tahun 2009 yaitu pada titik 0,085 dan pada tahun 2002 menjadi titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi yaitu pada titik 0,178.

Tren ketimpangan yang ada pada Provinsi Yogyakarta cenderung memburuk. Palsalnya, hal tersebut ditandai dengan kenaikan nilai ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Nilai ketimpangan pembangunan ekonomi yang membaik pada tahun 2010 turun ke titik 0,0820. Namun hal tersebut tidak bertahan lama. Nilai ketimpangan pembangunan ekonomi kembali meningkat sampai tahun 2016 dan berhenti ada titik 0,0854. Selanjutnya, nilai Indeks Williamson kembali membaik pada tahun 2017 kembali ke titik 0,0809.



Sumber : BPS diolah Excel

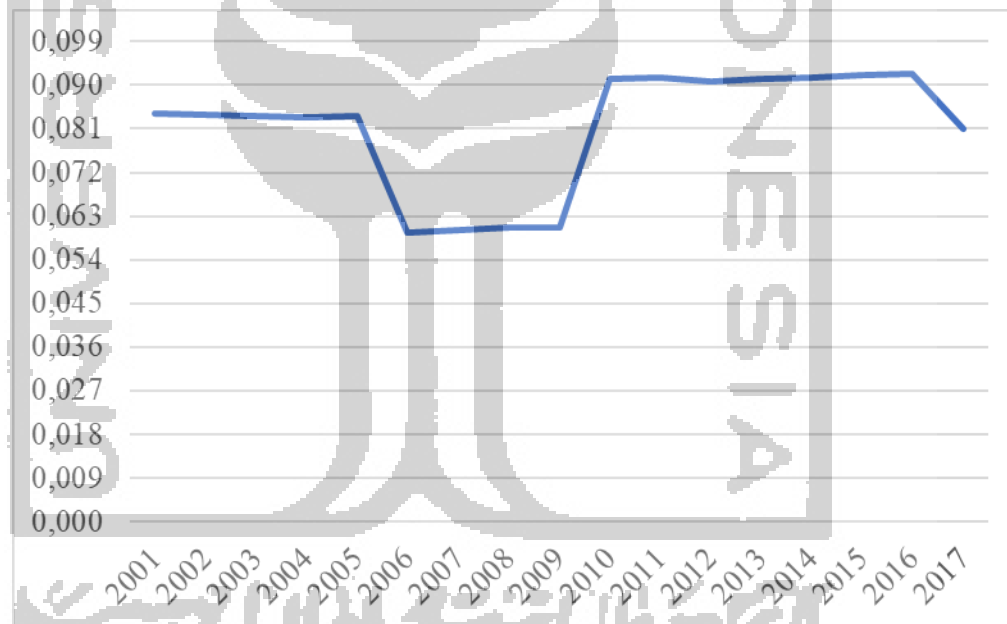
Gambar 4.6

Indeks Williamson Jawa Timur

Gambar 4.6 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada Gambar 4.6 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Jawa Timur berada pada titik 0,179. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Jawa Timur tergolong rendah. Tingkat tertinggi ketimpangan

pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur berada pada tahun 2005 yaitu pada titik 0,199. Pada tahun 2017 menjadi titik terendah ketimpangan pembangunan ekonomi yaitu pada titik 0,142.

Ketimpangan pembangunan yang ada pada Provinsi Jawa Timur cenderung membaik dari tahun 2001 hingga 2017. Walau pada tahun 2008 ketimpangan sempat memburuk hingga titik 0,199 ketimpangan terus membaik pada tahun berikutnya hingga tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan perbaikan pembangunan ekonomi dilakukan secara merata di Provinsi Jawa Timur.



Sumber : BPS diolah Excel

Gambar 4.7

Indeks Williamson Banten

Pada Gambar 4.7 menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Banten. Gambar 4.7 menunjukkan rata-rata ketimpangan pembangunan ekonomi dari tahun 2001-2017 di Provinsi Banten berada pada titik

0,081. Pada awal tahun observasi, Angka Indeks Williamson tercatat cukup stagnan pada tahun 2001 hingga 2005 pada titik 0,084. Angka tersebut mengalami penurunan setelahnya pada tahun 2006. Pada tahun 2006 tingkat ketimpangan pembangunan yang ada pada Provinsi Banten turun ke titik 0,060.

Tingkat Indeks Williamson kembali naik setelah tahun 2009. Angka mencatat tingkat Indeks Williamson naik ke titik 0,092 dan menjadikan nilai tersebut menjadi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi tertinggi. Nilai Indeks Williamson kembali stagnan hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, Indeks Williamson kembali turun ke titik 0,081. Tercatat, rata-rata Indeks Williamson yang ada pada Provinsi Banten berada pada titik 0,081.

Tabel 4.1

Analisis Statistik Deskriptif

	GOV	PDRB	URBAN_RATIO	WILLIAMSON
Mean	10155557	6.45E+08	0.60912	0.217435
Median	5281492	6.54E+08	0.522	0.192761
Maximum	51066081	1.64E+09	1	0.566445
Minimum	329286.2	43586466	0.404	0.059559
Std. Dev.	11087701	4.30E+08	0.196875	0.153294
Observations	102	102	102	102

Sumber: Data diolah Eviews 9

Pada tabel data 4.1 menunjukkan jumlah observasi pada wilayah Pulau Jawa sebanyak 102 observasi dengan rincian terdapat 6 provinsi di Pulau Jawa dan tahun penelitian selama 2001-2017. Pada analisis diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat indeks ketimpangan (*Williamson Index*) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,217 dengan nilai tertinggi sebesar 0,566 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan nilai terendah sebesar 0,193 di provinsi Jawa Timur pada tahun 2005.
2. Tingkat pengeluaran pemerintah memiliki rata-rata sebesar 10.155.557 juta rupiah dengan nilai tertinggi anggaran sebesar 51.066.081 juta rupiah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 dan tingkat anggaran paling rendah sebesar 32.928,6 juta rupiah di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2001.
3. PDRB memiliki rata-rata nilai sebesar 6.45E+08 juta rupiah dengan nilai tertinggi pada angka 1.64E+09 juta rupiah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan nilai terendah 43.586.466 juta rupiah di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2001.
4. Tingkat rasio penduduk kota memiliki rata-rata sebesar 0,609 dengan nilai tertinggi 1 pada rasionya di Provinsi DKI Jakarta dan nilai minimum sebesar 0,404 di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rasio penduduk kota tertinggi karena memiliki status sebagai Daerah Khusus Ibukota (Undang-Undang No. 10 Tahun 1964) dan menjadikan keseluruhan bagian dari provinsinya bagian dari kota.

4.2 Hasil dan Pembahasan Analisa

4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Pada data (panel), terdapat tiga model yang digunakan dalam menentukan hasil regresi yang akan dianalisis nanti. *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* ini dipilih dengan cara melakukan beberapa tes pada setiap model. Adapun dalam proses pemilihan model menggunakan dua uji yang terlebih dahulu digunakan. Kedua uji tersebut menggunakan Uji Hausman dan Uji Chow. Hasil dari uji pemilihan model sebagai berikut:

1. *Chow Test*

Uji Chow dilakukan dalam menentukan model regresi yang akan digunakan dalam metode analisa selanjutnya. Uji Chow digunakan untuk menentukan model lebih baik menggunakan *Common Effect Model* atau menggunakan *Fixed Effect Model*. Berikut hipotesis dari Uji Chow antara lain:

- a. H_0 : Estimasi model lebih baik menggunakan *Common Effect Model*
- b. H_1 : Estimasi model lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*

Dalam melakukan pemilihan uji, dapat menggunakan *Common Effect Model* ataupun *Fixed Effect Model* dapat melakukan perbandingan antara nilai probabilitas dengan nilai α ($\alpha=0,05$). Apabila probabilitas dari Uji Chow menunjukkan nilai yang signifikan ($\leq 0,05$), maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Apabila

nilai probabilitas tidak signifikan ($\geq 0,05$) maka model yang lebih baik digunakan adalah *Common Effect Model*.

Tabel 4.2

Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	580.401951	(5,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	354.154534	5	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9

Nilai Probabilitas dari *Cross-section F* menggunakan Eviews 9 menunjukkan hasil probabilitas yang kurang dari $\alpha(\alpha=0,05)$ sebesar 0.0000 sehingga probabilitas menolak H_0 dan gagal menolak H_1 . Maka Uji chow menunjukkan model yang lebih baik digunakan ialah *Fixed Effect Model*.

2. Hausman Test

Uji Hausman dilakukan untuk memilih estimasi model yang lebih baik di antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berikut hipotesis dari Uji Hausman yaitu:

- a. H_0 : Estimasi model lebih baik menggunakan *Random Effect Model*
- b. H_1 : Estimasi model lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*

Pada Uji Hausman dapat diketahui bahwa nilai probabilitas yang kurang dari $\alpha(\alpha=0,05)$ maka model estimasi yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Namun apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha(\alpha=0,05)$ maka model estimasi yang lebih baik adalah *Random Effect Model*.

Tabel 4.3

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	473.881352	3	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9

Hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dimiliki pada *cross-section random* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 ($\leq 5\%$) maka dapat diperoleh hasil H_0 ditolak dan gagal menolak H_1 . Oleh karena itu, model yang digunakan dalam metode regresi ialah *Fixed Effect Model*.

3. Estimasi *Fixed Effect Model*

Pada model estimasi *Fixed Effect* dapat diperhatikan bahwa setiap observasi pada unit *cross section* memiliki nilai intersep yang berbeda dalam waktu yang sama. Pada model ini koefisien regresi (*slope*) dapat diasumsikan tetap baik antar variabel maupun antar waktunya. Adapun hasil dari regresi *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.250097	13.43777	0.0000
GOV	3.78E-06	7.039971	0.0000
PDRB	-1.79E-07	-8.21807	0.0000
URBAN_RATIO	0.089775	2.676413	0.0088
R-squared	0.992675		
Adjusted R-squared	0.992038		
F-statistic	1558.489		
Prob(F-statistic)	0.000		

Sumber: Data diolah Eviews 9

$$V_{wit} = \beta_0 + \beta_1 GOV_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 UR_{it} + U_{it}$$

$$V_{wit} = 0.252332 + 3.78^{E-06} GOV_{it} + -1.79^{E-07} PDRB_{2it} + 0.089775 UR_{it} + U_{it}$$

- di mana:
- Y = Index williamson
 - β_0 = Koefisien intersep
 - β_1 = Koefisien pengaruh *Government Expenditure*
 - β_2 = Koefisien pengaruh PDRB
 - β_3 = Koefisien pengaruh *Urban Ratio*
 - U = Variabel pengganggu
 - i = Provinsi di Pulau Jawa (6 provinsi)
 - t = Tahun Observasi

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji t

Pada variabel Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) dapat diketahui bahwa nilai koefisiennya sebesar 3,78E-06 di mana memiliki nilai

probabilitas 0,0000 ($\leq 0,05$) menunjukkan secara statistik bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh ketimpangan pembangunan yang terjadi di Pulau Jawa.

Variabel PDRB menunjukkan bahwa nilai pada koefisien tersebut sebesar $-1,79E-07$ dengan nilai probabilitas 0,0000 ($\leq 0,05$) menunjukkan bahwa secara statistik PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa.

Pengaruh rasio penduduk kota terhadap ketimpangan pada *Fixed Effect Model* diketahui memiliki koefisien regresi sebesar 0,089963 dan memiliki probabilitas sebesar 0,0000 ($\leq 0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa rasio penduduk kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

4.3.2 Uji F

Uji F atau Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Pada hasil regresi model *Fixed Effect* di peroleh probabilitas *F-statistic* sebesar 0,0000 ($\leq 0,05$) maka PDRB, pengeluaran pemerintah dan rasio penduduk kota secara keseluruhan signifikan dan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan.

4.3.3 Koefisien Determinasi (*R-squared*)

Koefisien determinasi (*R-squared*) merupakan koefisien di mana koefisien tersebut menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen seperti: PDRB, pengeluaran pemerintah dan rasio penduduk kota berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi. Berdasarkan tabel uji

determinasi menunjukkan koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0,992675 (99,26%) maka variabel PDRB, pengeluaran pemerintah dan rasio penduduk kota memiliki pengaruh pada ketimpangan ekonomi sebesar 99,26%. Sedangkan 0,74% dijelaskan variabel-variabel lain di luar model yang memiliki pengaruh pada ketimpangan pembangunan.

4.4 Pembahasan

Pada bagian interpretasi ini akan dijelaskan hubungan antar variabel-variabel independen (PDRB, pengeluaran pemerintah, rasio penduduk kota) terhadap dengan variabel dependen yaitu variabel ketimpangan (*Index Williamson*). Pengeluaran Pemerintah (*Government expenditure*) memiliki nilai koefisien sebesar 3,78E-06 dan bernilai positif berpengaruh pada ketimpangan pembangunan. Hal tersebut berarti apabila pemerintah menambah jumlah pengeluarannya 1 miliar rupiah dari APBD, maka ketimpangan pembangunan akan naik sebesar 3,78E-06. Mailindra (2017) menjelaskan bahwa variasi belanja semakin meningkat yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan ketimpangan pembangunan bertambah dan sebaliknya. Selanjutnya, penelitian tersebut menjelaskan bahwa, pengeluaran rutin pemerintah daerah yang lebih tinggi dibandingkan anggaran pembangunan menjadikan pengeluaran pemerintah dalam sektor pembangunan ekonomi menjadi tidak merata. Hal ini dapat dijelaskan dalam anggaran belanja daerah yang masih belum matang dalam sektor pembangunan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai koefisien sebesar -1,79E-07 dan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hasil

penelitian tersebut menggambarkan apabila pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa meningkat 1 miliar rupiah maka ketimpangan pembangunan akan turun sebesar $1,79E-07$. Ginting (2015) menjelaskan bahwa peningkatan PDRB dengan menggali potensi daerah dapat dilakukan sebagai penggerak sumber ekonomi daerah sehingga pembangunan dapat merata.

Hal ini sama dengan apa yang disebutkan Vu (2016) bahwa pembangunan yang bersifat tidak merata ataupun terpusat dapat meningkatkan ketimpangan antar daerah atau provinsi. Terbukti dengan tingginya potensi ataupun perputaran ekonomi disuatu wilayah tanpa mengimbangnya dengan pemerataan dapat menyebabkan ketimpangan di wilayah tersebut. Namun berbeda dengan hal tersebut, Nugroho (2011) menjelaskan pelebaran tingkat ketimpangan dapat terjadi secara terus-menerus dengan ada peningkatan yang terjadi pada PDRB juga. Hal tersebut menggambarkan peran PDRB pada proses dan hasilnya dapat berpengaruh pada tingkat ketimpangan suatu wilayah.

Sedangkan *Urban Ratio* memiliki nilai koefisien sebesar 0,089963 dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal tersebut memiliki arti bahwa jika rasio kota bertambah 1% maka ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa naik 0.089963. Vu (2016) menjelaskan bahwa terpusatnya ekonomi pada suatu distrik menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi dan berdampak pada daerah lain yang ekonominya terus melambat. Dengan tingkat rasio perkotaan yang semakin tinggi dapat menggerus kegiatan ekonomi wilayah yang ada disekitar kawasan perkotaan. Begitu pula yang terjadi pada pulau Jawa, dengan tingkat rasio penduduk

kota terhitung tinggi, maka tingkat ketimpangan yang ada pada Pulau Jawa terus mengalami kenaikan.

Sun (2018) menjelaskan hal yang sama. Daerah pedesaan dan perkotaan yang mengalami perpadatan penduduk secara cepat menciptakan ketimpangan. Tak hanya dari kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik, tingkat urban ratio dinilai menjadikan ekonomi yang terpusat pada satu wilayah saja dan menjadikan wilayah pedesaan sebagai daerah yang tertinggal. Penilaian tersebut dapat dijelaskan pada tingkat pembaharuan teknologi yang terus meningkat dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Hal tersebut menjadikan daerah pedesaan jauh tertinggal dibandingkan daerah perkotaan. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan alat analisis yang digunakan diperoleh beberapa hasil dan pembahasannya. Olehkarena itu, dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

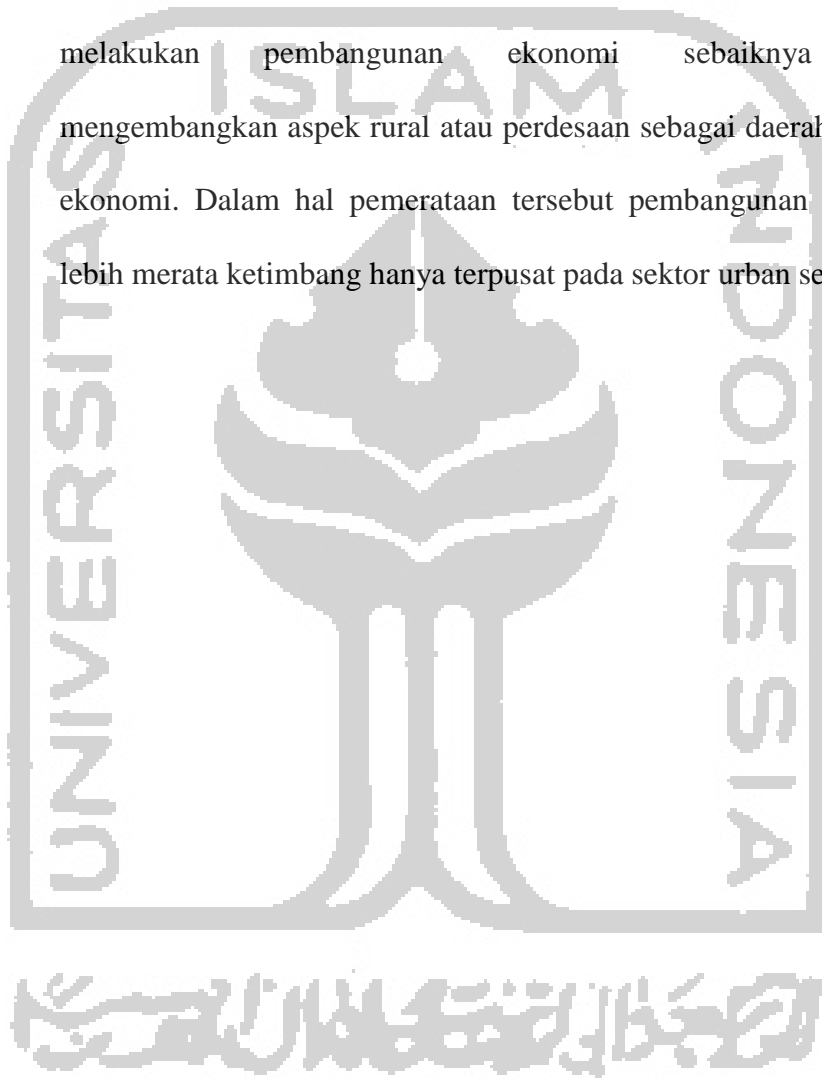
1. Pada variabel pengeluaran pemerintah daerah (*Government Expenditure*) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi belanja pemerintah yang tidak efektif dan merata sehingga ketimpangan di Pulau Jawa terus meningkat.
2. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB yang terus meningkat secara keseluruhan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa.
3. Pada variabel rasio penduduk kota (*Urban Ratio*) menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Olehkarena itu, apabila kepadatan penduduk sudah mendekati kota, maka ketimpangan pembangunan akan semakin meningkat.

5.2 Implikasi dan Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, diperoleh beberapa implikasi yang dapat memberikan rekomendasi dan tindakan nyata dalam pemecahan masalah pada penelitian ini. Implikasi yang diperoleh sebagai berikut:

1. Tingkat belanja pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran seharusnya menjadi evaluasi dalam ketetapannya. Faktor variasi belanja dalam APBD yang terus meningkat tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah ketimpangan yang ada di Pulau Jawa. Pengeluaran rutin pemerintah daerah yang lebih tinggi daripada pengeluaran pembangunannya menjadikan pembangunan ekonomi melambat. Efektifitas dalam APBD yang dianggarkan oleh pemerintah daerah nantinya dapat dievaluasi dari bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Pulau Jawa dapat berkurang. Olehkarena itu, pemerintah seharusnya harus lebih serius dalam mempersiapkan anggaran belanja pembangunan. Hal ini dapat mendorong segala sektor dalam pembangunan ekonomi yang lebih merata.
2. Peningkatan PDRB menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian ketimpangan pembangunan ekonomi. Dalam peningkatannya, pemerintah daerah dapat menetapkan regulasi-regulasi yang dapat meningkatkan PDRB secara keseluruhan sehingga ketimpangan pembangunan ekonomi dapat berkurang.

3. Tingkat rasio penduduk kota berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Terpusatnya penduduk pada suatu lokasi meningkatkan ketimpangan pembangunan antar provinsi. Dalam melakukan pembangunan ekonomi sebaiknya pemerintah mengembangkan aspek rural atau perdesaan sebagai daerah pembangunan ekonomi. Dalam hal pemerataan tersebut pembangunan ekonomi dapat lebih merata ketimbang hanya terpusat pada sektor urban semata.



DAFTAR PUSTAKA

- Aidar, N. (2003). Disparitas Pendapatan Regional Provinsi Aceh. *Universitas Syah Kuala*.
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: SITE YKPN.
- Delis, A. (2009). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4.
- Ginting, A. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol 20, No.1.
- Khairunnisa, A. (2016). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Universitas Sumatera Utara*, Vol.3 NO.7.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mailindra, W. (2017). Pengaruh Keragaman Belanja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Jurnal Of Economics and Business*, Vol.1 No.1 September 2017.
- N.Gujarati, D. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, B. S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan. *journal of economics and policy Universitas Jendral Soedirman*, Jejak 7 (1) (2014): 46-59.
- Nuryanto. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Rubiarko. (2013). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011. *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi Bisnis*, 5-9.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media.

- Smith, C. M. T. (2014). *Economics Development*. Pearson.
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets 12 Universitas Islam Indonesia*, Vol.12 Hal: 27-36.
- Soseco, T. (2010). Perkiraan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Dengan Indeks Theil. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Negeri Malang*, vol. 2(2).
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Pengantar Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sun, Q. (2018). Export Sophistication Upgrade and Urban-Rural Income Inequality: Evidence from China 2000-2009. *Journal of Comparative Economics*, 22(2):141-164.
- Pemerintah Indonesia. 1964. Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, No.78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Vu, X.-B. (2016). Analysis of GDP trends and inequalities in Vietnam's provinces and groups of provinces. *Asian Journal of Empirical Research, Asian Economic and Social Society*, 167-186.
- Wajdi, F. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. *Institut Pertanian Bogor*.
- Widarjono, A. (2013). *konometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia.
- Zulfan, M. (2003). Aspiration to Inequality: Regional Disparity and Centre-Regional Conflict in Indonesia. *UNU/WIDER Conference on Spatial Inequality in Asia*, 28-29.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Indeks Williamson DKI Jakarta Tahun 2001-2017

Tahun	PDRB/Kapita	Rata-Rata	$(y_i - \bar{y})^2$	Proporsi Penduduk	Indeks Williamson
2001	Rp 80.530.344	Rp 26.306.654	Rp 2.940.208.531.511.970	0,069	0,524607034
2002	Rp 84.469.875	Rp 27.498.101	Rp 3.245.783.090.681.340	0,069	0,527348338
2003	Rp 88.955.395	Rp 28.892.994	Rp 3.607.492.017.624.420	0,069	0,528934949
2004	Rp 93.983.335	Rp 30.480.898	Rp 4.032.559.520.425.260	0,069	0,531226512
2005	Rp 99.633.887	Rp 32.240.944	Rp 4.541.808.813.344.420	0,069	0,533137197
2006	Rp 105.557.909	Rp 34.069.847	Rp 5.110.542.971.958.000	0,069	0,521360581
2007	Rp 112.355.333	Rp 36.812.940	Rp 5.706.653.075.275.810	0,069	0,522569854
2008	Rp 119.357.778	Rp 39.018.894	Rp 6.454.336.321.732.800	0,069	0,522901243
2009	Rp 125.345.893	Rp 40.915.580	Rp 7.128.477.666.364.810	0,069	0,525994501
2010	Rp 116.567.538	Rp 37.821.615	Rp 6.200.920.295.207.650	0,070	0,51448724
2011	Rp 119.440.432	Rp 39.546.419	Rp 6.383.053.228.842.740	0,070	0,51088378
2012	Rp 127.243.446	Rp 42.069.161	Rp 7.254.658.841.837.150	0,070	0,510181161
2013	Rp 134.962.877	Rp 44.607.375	Rp 8.164.116.749.578.100	0,070	0,511109335
2014	Rp 142.915.544	Rp 47.130.842	Rp 9.174.709.176.551.650	0,070	0,513799922
2015	Rp 151.394.265	Rp 49.777.295	Rp 10.326.008.498.264.000	0,070	0,515886279
2016	Rp 160.294.790	Rp 52.581.967	Rp 11.602.052.221.898.200	0,070	0,518608052
2017	Rp 170.263.532	Rp 55.644.615	Rp 13.137.496.090.794.800	0,070	0,56644483

Lampiran 2

Indeks Williamson Jawa Barat Tahun 2001-2017

Tahun	Pendapatan/Kapita	Rata-Rata	$(y_i - \bar{y})^2$	Proporsi Penduduk	Indeks Williamson
2001	Rp 15.204.047	Rp 26.306.654	Rp 123.267.879.936.221	0,294	0,239079059
2002	Rp 15.775.694	Rp 27.498.101	Rp 137.414.810.958.589	0,294	0,239874735
2003	Rp 16.512.388	Rp 28.892.994	Rp 153.279.403.269.288	0,294	0,241790841
2004	Rp 17.300.550	Rp 30.480.898	Rp 173.721.583.284.321	0,294	0,242093373
2005	Rp 18.269.395	Rp 32.240.944	Rp 195.204.192.490.208	0,294	0,241166418
2006	Rp 19.368.758	Rp 34.069.847	Rp 216.122.033.697.880	0,294	0,245518426
2007	Rp 20.623.469	Rp 36.812.940	Rp 262.098.963.762.914	0,294	0,24512421
2008	Rp 21.904.106	Rp 39.018.894	Rp 292.915.955.831.558	0,294	0,247344282
2009	Rp 22.821.730	Rp 40.915.580	Rp 327.387.422.402.220	0,294	0,247015758
2010	Rp 20.114.058	Rp 37.821.615	Rp 313.557.600.024.437	0,315	0,251462278
2011	Rp 22.428.301	Rp 39.546.419	Rp 293.029.967.746.704	0,315	0,252983477
2012	Rp 23.886.657	Rp 42.069.161	Rp 330.603.430.412.526	0,315	0,252487671
2013	Rp 25.399.507	Rp 44.607.375	Rp 368.942.202.065.818	0,315	0,254458665
2014	Rp 26.692.600	Rp 47.130.842	Rp 417.721.723.268.266	0,315	0,255966062
2015	Rp 28.040.132	Rp 49.777.295	Rp 472.504.244.998.918	0,315	0,255789754
2016	Rp 29.626.413	Rp 52.581.967	Rp 526.957.455.887.273	0,315	0,257418226
2017	Rp 31.192.496	Rp 55.644.615	Rp 597.906.119.388.303	0,315	0,465969335

Lampiran 3

Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2001-2017

Tahun	Pendapatan/Kapita	Rata-Rata	$(y-y_i)^2$	Proporsi Penduduk	Indeks Williamson
2001	Rp 12.722.684	Rp 26.306.654	Rp 184.524.233.479.158	0,257	0,194383349
2002	Rp 13.174.785	Rp 27.498.101	Rp 205.157.373.335.093	0,257	0,197916749
2003	Rp 13.830.954	Rp 28.892.994	Rp 226.865.055.867.395	0,257	0,200178081
2004	Rp 14.540.179	Rp 30.480.898	Rp 254.106.531.658.119	0,257	0,202889421
2005	Rp 15.317.712	Rp 32.240.944	Rp 286.395.772.856.126	0,257	0,203152719
2006	Rp 16.134.876	Rp 34.069.847	Rp 321.663.194.514.081	0,257	0,208839918
2007	Rp 17.037.291	Rp 36.812.940	Rp 391.076.308.528.316	0,257	0,207688681
2008	Rp 17.992.884	Rp 39.018.894	Rp 442.093.098.296.860	0,257	0,204158342
2009	Rp 18.917.932	Rp 40.915.580	Rp 483.896.500.638.458	0,257	0,209573589
2010	Rp 19.309.563	Rp 37.821.615	Rp 342.696.080.228.158	0,237	0,166384282
2011	Rp 20.266.037	Rp 39.546.419	Rp 371.733.129.064.615	0,237	0,152975282
2012	Rp 21.349.178	Rp 42.069.161	Rp 429.317.671.840.368	0,237	0,151907424
2013	Rp 22.439.639	Rp 44.607.375	Rp 491.408.528.001.953	0,237	0,150109907
2014	Rp 23.622.495	Rp 47.130.842	Rp 552.642.378.258.770	0,237	0,151627653
2015	Rp 24.913.493	Rp 49.777.295	Rp 618.208.663.063.622	0,237	0,153367069
2016	Rp 26.227.409	Rp 52.581.967	Rp 694.562.705.307.414	0,237	0,153975093
2017	Rp 27.608.929	Rp 55.644.615	Rp 785.999.710.933.001	0,237	0,114986748

Lampiran 4

Indeks Williamson D.I Yogyakarta Tahun 2001-2017

Tahun	Pendapatan/Kapita	Rata-rata	$(y_i - \bar{y})^2$	Proporsi Penduduk	Indeks Williamson
2001	Rp 13.959.873	Rp 26.306.654	Rp 152.442.996.957.640	0,026	0,077430911
2002	Rp 14.587.806	Rp 27.498.101	Rp 166.675.722.067.184	0,026	0,077717004
2003	Rp 15.256.371	Rp 28.892.994	Rp 185.957.489.276.054	0,026	0,077970589
2004	Rp 16.037.061	Rp 30.480.898	Rp 208.624.417.894.838	0,026	0,078728479
2005	Rp 16.796.337	Rp 32.240.944	Rp 238.535.876.865.136	0,026	0,080271219
2006	Rp 17.416.978	Rp 34.069.847	Rp 277.318.064.939.105	0,026	0,08303621
2007	Rp 18.167.621	Rp 36.812.940	Rp 347.647.920.361.627	0,026	0,08379034
2008	Rp 19.082.353	Rp 39.018.894	Rp 397.465.685.766.593	0,026	0,08418387
2009	Rp 19.928.359	Rp 40.915.580	Rp 440.463.448.900.444	0,026	0,085046884
2010	Rp 18.874.990	Rp 37.821.615	Rp 358.974.601.753.514	0,025	0,082015241
2011	Rp 19.681.866	Rp 39.546.419	Rp 394.600.472.338.105	0,025	0,083210738
2012	Rp 20.738.289	Rp 42.069.161	Rp 455.006.066.024.303	0,025	0,083703018
2013	Rp 21.873.506	Rp 44.607.375	Rp 516.828.794.818.744	0,025	0,084128965
2014	Rp 23.003.988	Rp 47.130.842	Rp 582.105.076.504.506	0,025	0,084565741
2015	Rp 24.143.071	Rp 49.777.295	Rp 657.113.431.712.551	0,025	0,084952675
2016	Rp 25.361.801	Rp 52.581.967	Rp 740.937.413.281.572	0,025	0,085365964
2017	Rp 26.695.850	Rp 55.644.615	Rp 838.031.029.126.647	0,025	0,080866582

Lampiran 5

Indeks Williamson Jawa Timur Tahun 2001-2017

Tahun	Pendapatan/Kapita	Rata-Rata	$(y_i - \bar{y})^2$	Proporsi Penduduk	Indeks Williamson
2001	Rp 17.336.548	Rp 26.306.654	Rp 80.462.804.959.677	0,287	0,194424448
2002	Rp 17.960.083	Rp 27.498.101	Rp 90.973.783.014.843	0,287	0,194975007
2003	Rp 18.817.757	Rp 28.892.994	Rp 101.510.410.551.176	0,287	0,193716925
2004	Rp 19.914.870	Rp 30.480.898	Rp 111.640.940.348.828	0,287	0,193285517
2005	Rp 21.077.871	Rp 32.240.944	Rp 124.614.192.935.941	0,287	0,192235594
2006	Rp 22.345.891	Rp 34.069.847	Rp 137.451.146.709.797	0,287	0,198359062
2007	Rp 23.711.187	Rp 36.812.940	Rp 171.655.941.281.025	0,287	0,198765042
2008	Rp 25.119.891	Rp 39.018.894	Rp 193.182.289.531.628	0,287	0,198629564
2009	Rp 26.379.630	Rp 40.915.580	Rp 211.293.841.515.256	0,287	0,196752751
2010	Rp 26.118.429	Rp 37.821.615	Rp 136.964.556.616.555	0,274	0,161039779
2011	Rp 28.134.819	Rp 39.546.419	Rp 130.224.618.222.161	0,274	0,162337217
2012	Rp 30.004.321	Rp 42.069.161	Rp 145.560.360.796.507	0,274	0,162631833
2013	Rp 31.827.455	Rp 44.607.375	Rp 163.326.345.134.311	0,274	0,16231125
2014	Rp 33.692.470	Rp 47.130.842	Rp 180.589.851.381.837	0,274	0,162744974
2015	Rp 35.525.382	Rp 49.777.295	Rp 203.117.033.480.544	0,274	0,162827619
2016	Rp 37.504.874	Rp 52.581.967	Rp 227.318.734.515.142	0,274	0,164196139
2017	Rp 39.548.448	Rp 55.644.615	Rp 259.086.588.311.146	0,274	0,142250964

Lampiran 6

Indeks Williamson Banten Tahun 2001-2017

Tahun	Pendapatan/Kapita	Rata-Rata	$(y_i - \bar{y})^2$	Proporsi Penduduk	Indeks Williamson
2001	Rp 18.086.428	Rp 26.306.654	Rp 67.572.117.496.035	0,067	0,084102648
2002	Rp 19.020.361	Rp 27.498.101	Rp 71.872.066.220.154	0,067	0,083891413
2003	Rp 19.985.100	Rp 28.892.994	Rp 79.350.580.613.002	0,067	0,083585107
2004	Rp 21.109.393	Rp 30.480.898	Rp 87.825.108.292.829	0,067	0,083299383
2005	Rp 22.350.461	Rp 32.240.944	Rp 97.821.648.906.360	0,067	0,083505869
2006	Rp 23.594.672	Rp 34.069.847	Rp 109.729.296.677.138	0,067	0,059558966
2007	Rp 28.982.740	Rp 36.812.940	Rp 61.312.032.961.627	0,067	0,060110596
2008	Rp 30.656.352	Rp 39.018.894	Rp 69.932.107.233.614	0,067	0,06060862
2009	Rp 32.099.937	Rp 40.915.580	Rp 77.715.568.753.390	0,067	0,060562201
2010	Rp 25.945.114	Rp 37.821.615	Rp 141.051.289.684.022	0,078	0,091322335
2011	Rp 27.327.060	Rp 39.546.419	Rp 149.312.735.874.451	0,078	0,091671567
2012	Rp 29.193.072	Rp 42.069.161	Rp 165.793.647.320.596	0,078	0,090770525
2013	Rp 31.141.266	Rp 44.607.375	Rp 181.336.094.759.720	0,078	0,091221248
2014	Rp 32.857.955	Rp 47.130.842	Rp 203.715.312.795.490	0,078	0,091435935
2015	Rp 34.647.428	Rp 49.777.295	Rp 228.912.885.937.436	0,078	0,091999081
2016	Rp 36.476.514	Rp 52.581.967	Rp 259.385.610.414.186	0,078	0,092250959
2017	Rp 38.558.436	Rp 55.644.615	Rp 291.937.514.268.172	0,078	0,08085479

Lampiran 7

Data Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (*Williamson Index*), *Government Expenditure*, PDRB, dan rasio penduduk kota selama tahun 2001-2017

Tahun	Provinsi	GOV (Miliar)	PDRB (Miliar)	URBAN RATIO	WILLIAMSON INDEX
2001	Jakarta	6856.701	675604.7301	1	0.524607034
2002	Jakarta	8556.136	708655.2024	1	0.527348338
2003	Jakarta	10382.597	746286.2108	1	0.528934949
2004	Jakarta	11493.273	788467.833	1	0.531226512
2005	Jakarta	12438.464	835872.8085	1	0.533137197
2006	Jakarta	15175.454	885572.0577	1	0.521360581
2007	Jakarta	17284.146	942598.6568	1	0.522569854
2008	Jakarta	15956.526	1001345.276	1	0.522901243
2009	Jakarta	19511.099	1051582.221	1	0.525994501
2010	Jakarta	21552.896	1119956.072	1	0.51448724
2011	Jakarta	26423.599	1233010.071	1	0.51088378
2012	Jakarta	31558.706	1298311.505	1	0.510181161
2013	Jakarta	38301.502	1296694.573	1	0.511109335
2014	Jakarta	37799.664	1373389.129	1	0.513799922
2015	Jakarta	43031.322	1454563.847	1	0.515886279
2016	Jakarta	47128.81	1540078.198	1	0.518608052
2017	Jakarta	51066.081	1635855.75	1	0.56644483
2001	Jawa Barat	2217.837	459250.2578	0.503	0.239079059
2002	Jawa Barat	2368.343	476517.311	0.503	0.239874735
2003	Jawa Barat	3132.772	498769.7253	0.503	0.241790841
2004	Jawa Barat	3670.567	522576.7682	0.503	0.242093373
2005	Jawa Barat	4240.269	551841.4996	0.503	0.241166418
2006	Jawa Barat	4907.738	585048.6219	0.503	0.245518426
2007	Jawa Barat	5341.776	622948.1806	0.503	0.24512421
2008	Jawa Barat	6110.959	661630.836	0.503	0.247344282
2009	Jawa Barat	8193.613	689348.3728	0.503	0.247015758

2010	Jawa Barat	9106.338	732104.877	0.6569	0.251462278
2011	Jawa Barat	10296.99	816337.955	0.6569	0.252983477
2012	Jawa Barat	16922.477	821992.84	0.6569	0.252487671
2013	Jawa Barat	18396.745	1093543.545	0.6569	0.254458665
2014	Jawa Barat	20797.988	1149216.057	0.6569	0.255966062
2015	Jawa Barat	24417.605	1207232.342	0.6569	0.255789754
2016	Jawa Barat	27621.964	1275527.644	0.6569	0.257418226
2017	Jawa Barat	32706.749	1342953.376	0.6569	0.465969335
2001	Jawa Tengah	1508.025	473344.8202	0.404	0.194383349
2002	Jawa Tengah	2133.152	490165.1293	0.404	0.197916749
2003	Jawa Tengah	2606.624	514577.7496	0.404	0.200178081
2004	Jawa Tengah	2538.437	540964.3159	0.404	0.202889421
2005	Jawa Tengah	2908.969	569892.2934	0.404	0.203152719
2006	Jawa Tengah	3747.644	600294.6879	0.404	0.208839918
2007	Jawa Tengah	3905.527	633868.8438	0.404	0.207688681
2008	Jawa Tengah	5162.662	669421.4952	0.404	0.204158342
2009	Jawa Tengah	3403.964	703837.73	0.404	0.209573589
2010	Jawa Tengah	5968.034	744949.021	0.4572	0.166384282
2011	Jawa Tengah	7776.705	781849.108	0.4572	0.152975282
2012	Jawa Tengah	11446.844	809931.905	0.4572	0.151907424
2013	Jawa Tengah	12724.776	726655.118	0.4572	0.150109907
2014	Jawa Tengah	15086.065	764959.15	0.4572	0.151627653
2015	Jawa Tengah	17820.76	806765.0922	0.4572	0.153367069
2016	Jawa Tengah	19354.374	849313.1997	0.4572	0.153975093
2017	Jawa Tengah	22884.713	894050.4725	0.4572	0.114986748
2001	Yogyakarta	329.286	58606.25372	0.577	0.077430911
2002	Yogyakarta	398.271	61242.4337	0.577	0.077717004
2003	Yogyakarta	786.919	64049.19851	0.577	0.077970589
2004	Yogyakarta	640.091	67326.69158	0.577	0.078728479
2005	Yogyakarta	673.649	70514.27631	0.577	0.080271219
2006	Yogyakarta	850.63	73119.84608	0.577	0.08303621
2007	Yogyakarta	977.994	76271.19144	0.577	0.08379034
2008	Yogyakarta	698.566	80111.41432	0.577	0.08418387
2009	Yogyakarta	1412.049	83663.11074	0.577	0.085046884
2010	Yogyakarta	1686.317	87748.578	0.6644	0.082015241
2011	Yogyakarta	1562.268	91499.69	0.6644	0.083210738

2012	Yogyakarta	2053.825	96166.124	0.6644	0.083703018
2013	Yogyakarta	2509.643	75627.449	0.6644	0.084128965
2014	Yogyakarta	2981.068	79536.081	0.6644	0.084565741
2015	Yogyakarta	3496.425	83474.45154	0.6644	0.084952675
2016	Yogyakarta	3847.962	87688.19984	0.6644	0.085365964
2017	Yogyakarta	4920.626	92300.65982	0.6644	0.080866582
2001	Jawa Timur	1844.537	602764.726	0.409	0.194424448
2002	Jawa Timur	2815.05	625684.7599	0.409	0.194975007
2003	Jawa Timur	3690.578	655571.7238	0.409	0.193716925
2004	Jawa Timur	3516.027	693815.8563	0.409	0.193285517
2005	Jawa Timur	4033.876	734361.1163	0.409	0.192235594
2006	Jawa Timur	4780.246	776931.7684	0.409	0.198359062
2007	Jawa Timur	5267.845	824400.9698	0.409	0.198765042
2008	Jawa Timur	6639.78	873379.4142	0.409	0.198629564
2009	Jawa Timur	4972.599	917178.5825	0.409	0.196752751
2010	Jawa Timur	10104.866	978406.293	0.4758	0.161039779
2011	Jawa Timur	11685.92	1054862.738	0.4758	0.162337217
2012	Jawa Timur	15161.976	1128092.446	0.4758	0.162631833
2013	Jawa Timur	16738.657	1192789.801	0.4758	0.16231125
2014	Jawa Timur	20006.319	1262684.495	0.4758	0.162744974
2015	Jawa Timur	22946.307	1331376.099	0.4758	0.162827619
2016	Jawa Timur	23859.953	1405561.044	0.4758	0.164196139
2017	Jawa Timur	28878.134	1482147.588	0.4758	0.142250964
2001	Banten	348.882	168628.2882	0.522	0.084102648
2002	Banten	955.003	175565.5792	0.522	0.083891413
2003	Banten	1121.715	184470.5025	0.522	0.083585107
2004	Banten	1091.721	194848.1816	0.522	0.083299383
2005	Banten	1488.139	206303.7402	0.522	0.083505869
2006	Banten	1797.939	217788.3025	0.522	0.059558966
2007	Banten	1611.817	230943.0036	0.522	0.060110596
2008	Banten	2253.982	244278.8404	0.522	0.06060862
2009	Banten	2420.82	255781.7464	0.522	0.060562201
2010	Banten	2834.571	271408.283	0.6701	0.091322335
2011	Banten	3901.218	295225.381	0.6701	0.091671567
2012	Banten	5317.735	325826.639	0.6701	0.090770525
2013	Banten	5295.139	331099.105	0.6701	0.091221248

2014	Banten	6192.155	349351.227	0.6701	0.091435935
2015	Banten	8084.14	368377.203	0.6701	0.091999081
2016	Banten	8925.813	387824.3528	0.6701	0.092250959
2017	Banten	9512.813	409959.6941	0.6701	0.08085479

Lampiran 8

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	580.401951	(5,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	354.154534	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: WILLIAMSON_INDEX

Method: Panel Least Squares

Date: 08/21/19 Time: 05:12

Sample: 2001 2017

Periods included: 17

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 102

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.266325	0.034131	-7.802958	0.0000
GOVMIL	-8.49E-06	1.68E-06	-5.068855	0.0000
PDRBMIL	3.69E-07	3.88E-08	9.523471	0.0000
URBAN_RATIO	0.558801	0.050215	11.12825	0.0000

R-squared	0.766819	Mean dependent var	0.227170
Adjusted R-squared	0.759681	S.D. dependent var	0.157511
S.E. of regression	0.077215	Akaike info criterion	-2.246009
Sum squared resid	0.584298	Schwarz criterion	-2.143069
Log likelihood	118.5464	Hannan-Quinn criter.	-2.204325
F-statistic	107.4246	Durbin-Watson stat	0.125964
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	473.881352	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GOVMIL	0.000004	0.000000	0.000000	0.0000
PDRBMIL	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0000
URBAN_RATIO	0.089775	0.217772	0.000471	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: WILLIAMSON_INDEX

Method: Panel Least Squares

Date: 08/21/19 Time: 05:13

Sample: 2001 2017

Periods included: 17

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 102

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.250097	0.018595	13.44946	0.0000
GOVMIL	3.78E-06	5.34E-07	7.080438	0.0000
PDRBMIL	-1.79E-07	2.16E-08	-8.271397	0.0000
URBAN_RATIO	0.089775	0.033246	2.700322	0.0082

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992759	Mean dependent var	0.227170
Adjusted R-squared	0.992136	S.D. dependent var	0.157511
S.E. of regression	0.013967	Akaike info criterion	-5.620073
Sum squared resid	0.018143	Schwarz criterion	-5.388458
Log likelihood	295.6237	Hannan-Quinn criter.	-5.526284
F-statistic	1593.891	Durbin-Watson stat	0.751438
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10

Dependent Variable: WILLIAMSON_INDEX

Method: Panel Least Squares

Date: 08/21/19 Time: 05:15

Sample: 2001 2017

Periods included: 17

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 102

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.250097	0.018595	13.44946	0.0000
GOVMIL	3.78E-06	5.34E-07	7.080438	0.0000
PDRBMIL	-1.79E-07	2.16E-08	-8.271397	0.0000
URBAN_RATIO	0.089775	0.033246	2.700322	0.0082

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992759	Mean dependent var	0.227170
Adjusted R-squared	0.992136	S.D. dependent var	0.157511
S.E. of regression	0.013967	Akaike info criterion	-5.620073
Sum squared resid	0.018143	Schwarz criterion	-5.388458
Log likelihood	295.6237	Hannan-Quinn criter.	-5.526284
F-statistic	1593.891	Durbin-Watson stat	0.751438
Prob(F-statistic)	0.000000		